



PISAgroNEWS

Partnership for Indonesia's Sustainable Agriculture

ISSUE NO. 63:
MAY 2026

Special Edition: **Empowering Women, Driving Self-Sufficiency,
and Navigating Agribusiness Dynamics**



Contact Us:  contact@pisagro.org  www.pisagro.org  [pisagro_secretariat](https://www.instagram.com/pisagro_secretariat)  PISAgro

Daftar Isi

- 03 Kata Pengantar**
Opening Remarks
- 04 Tentang PISAgro**
About PISAgro
- 06 Prolog**
Tahun Internasional Petani Perempuan 2026: Memberdayakan Perempuan untuk Membangun Sistem Pangan yang Tangguh
- 10 Prologue**
International Year of the Woman Farmer 2026: Empowering Women to Build Resilient Food Systems
- 14 Fitur**
Upaya-upaya untuk Mencapai Swasembada Jagung Nasional
- 19 Feature**
Various Efforts to Achieve National Corn Self-Sufficiency
- 24 Fitur**
Memahami DHE SDA dan DSI: Implikasinya bagi Stabilitas Ekonomi, Rantai Pasok, dan Petani Kelapa Sawit Indonesia
- 29 Feature**
Understanding DHE SDA and DSI: Implications for Economic Stability, Supply Chains, and Indonesia's Palm Oil Smallholders
- 34 Kabar PISAgro**
Panen Raya Jagung Serentak, Triputra Agro Persada Turut Memperkuat Ketahanan Pangan
- 36 PISAgro Update**
Simultaneous Corn Harvest, Triputra Agro Persada Strengthens National Food Security
- 38 Sorotan - PISAgro 2.0 (Mei 2026)**
41 Highlights - PISAgro 2.0 (May 2026)
- 44 Sorotan**
64 Highlights
- 84 Profil**
Memberdayakan Petani: Kisah Ibu Ayu, Petani Perempuan Binaan Rikolto dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan
- 88 Profile**
Empowering Farmers: The Story of Mrs. Ayu, a Rikolto-Supported Woman Farmer from North Luwu, South Sulawesi

Tim Editorial

KONTEN

Fathan Oktrisaf
Ferial Lubis
Hendri Surya W.
Nadia Fairus
William Widjaja
Alicia Ceu

Haridi Walid
Sharaf Tariq

DESAIN & TATA LETAK

Hendri Surya W.

KONTRIBUTOR FOTO

Anggota & Mitra
PISAgro, Istimewa

Kata Pengantar



Insan Syafaat

Direktur Eksekutif
Sekretariat PISAgro

Rekan-rekan yang Terhormat,

Selamat datang di PISAgro News edisi Juni 2026. Selamat memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni 2026. Momentum global ini menjadi pengingat bahwa keberlanjutan lingkungan dan ketahanan pangan saling berkaitan erat. Membangun sistem pangan yang tangguh tidak hanya memerlukan peningkatan produktivitas dan penguatan rantai pasok, tetapi juga upaya menjaga sumber daya alam, keanekaragaman hayati, serta mendukung ketahanan terhadap perubahan iklim di masa depan.

Pada rubrik Prolog edisi kali ini, kami menghadirkan artikel “Tahun Internasional Petani Perempuan 2026: Memberdayakan Perempuan untuk Membangun Sistem Pangan yang Tangguh” yang menyoroti pentingnya peran perempuan petani dalam memperkuat pertanian, ketahanan pangan, dan pembangunan berkelanjutan.

Pada rubrik Fitur, terdapat dua artikel utama. “Upaya-upaya untuk Mencapai Swasembada Jagung Nasional” membahas berbagai langkah Indonesia dalam meningkatkan produksi jagung dan mendukung ketahanan pangan. Sementara itu, “Memahami DHE SDA dan DSI: Implikasinya bagi Stabilitas Ekonomi, Rantai Pasok, dan Petani Kelapa Sawit Indonesia” mengulas kebijakan terbaru serta dampaknya bagi sektor pertanian dan pelaku usaha.

Pada rubrik Kabar PISAgro, artikel “Panen Raya Jagung Serentak, Triputra Agro Persada Turut Memperkuat Ketahanan Pangan” menampilkan peran sektor swasta dalam mendukung produktivitas dan ketahanan pangan melalui kolaborasi dan inovasi.

Pada rubrik Profil, kami berbagi kisah inspiratif “Memberdayakan Petani: Kisah Ibu Ayu, Petani Perempuan Binaan Rikolto dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan.” Pengalamannya menunjukkan bagaimana akses terhadap pengetahuan, pelatihan, dan pendampingan dapat membantu perempuan petani meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat sistem pangan di tingkat lokal.

Seiring dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan upaya transformasi pertanian berkelanjutan yang terus berjalan, kami berharap edisi Juni 2026 ini dapat memberikan wawasan, inspirasi, dan perspektif mengenai pentingnya kolaborasi dalam membangun sistem pangan yang produktif, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Selamat membaca dan kami berharap bahwa edisi kali ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan memperkaya pemahaman kita semua mengenai upaya-upaya luar biasa yang dilakukan dalam mendukung sektor pertanian Indonesia.

Opening Remarks



Insan Syafaat

Executive Director
PISAgro Secretariat

To our distinguished readers,

Welcome to the June 2026 edition of PISAgro News. Happy World Environment Day on June 5th, 2026. This global observance serves as an important reminder that environmental sustainability and food security are deeply interconnected. Building resilient food systems requires not only increasing productivity and strengthening supply chains, but also ensuring that agricultural development protects natural resources, supports biodiversity, and contributes to climate resilience for future generations.

In this edition's Prologue section, we present “International Year of the Woman Farmer 2026: Empowering Women to Build Resilient Food Systems,” highlighting the important role of women farmers in strengthening agriculture, food security, and sustainable development.

Our Feature section presents two articles. “Various Efforts to Achieve National Corn Self-Sufficiency” explores Indonesia's efforts to strengthen domestic corn production and food security. Meanwhile, “Understanding DHE SDA and DSI: Implications for Economic Stability, Supply Chains, and Indonesia's Palm Oil Smallholders” examines recent policy developments and their potential impacts on the agricultural sector.

In the PISAgro Update section, we feature “Simultaneous Corn Harvest, Triputra Agro Persada Strengthens National Food Security,” showcasing the role of the private sector in supporting agricultural productivity and food security through collaboration and innovation.

In our Profile section, we share the inspiring story “Empowering Farmers: The Story of Mrs. Ayu, a Rikolto-Supported Woman Farmer from North Luwu, South Sulawesi.” Her experience demonstrates how knowledge, training, and support can help women farmers improve their livelihoods and strengthen local food systems.

As we commemorate World Environment Day and continue advancing sustainable agricultural transformation, we hope this June 2026 edition provides valuable insights, inspiration, and perspectives on the importance of collaboration in building food systems that are productive, inclusive, resilient, and environmentally sustainable.

Happy reading, and we hope this edition enriches your understanding of the outstanding efforts being made to support Indonesia's agricultural sector.



Kelompok Kerja

Setiap kelompok kerja wajib mengembangkan rantai pasok dengan lengkap dari hulu ke hilir dan menyusun rencana kerja yang meliputi kebutuhan permodalan, target produksi, target pembelian, target pelatihan petani, hingga waktu pelaksanaannya. Setiap rantai pasok melaksanakan berbagai proyek percontohan, mulai dari pelatihan petani mengenai pengelolaan kebun yang baik hingga membuka ketersediaan akses keuangan dan jaminan pembelian.



AgriTech & Inovasi Digital



Kakao



Kacang Tanah



Kopi



Jagung



Susu



Hortikultura



Pemberdayaan Perempuan



Kemampuan-
telusuran



Kelapa Sawit



Kentang



Karet



Kelapa



Padi



Sapi Potong



Pengembangan
Kapasitas



Pendapatan
Hidup



Pertanian
Regeneratif

Sekretariat PISAgro

Insan Syafaat
Direktur Eksekutif

Fathan Oktrisaf
Manajer Pelibatan Strategis

Alicia Ceu
Spesialis Pelibatan Strategis

Hendri Surya Widcaksana
Manajer Komunikasi

Nadia Fairus
Manajer Perkantoran

Ferial Lubis
Konsultan Pendukung Hubungan Pemerintah

William Widjaja
Manajer Proyek & Media Sosial

Haridi Walid
Pemagang

Sharaf Tariq
Pemagang



Working Groups

Every working group is required to develop their chain supply from their downstream line to the upstream as well as formulating a working plan which includes capital needs, production target, purchasing order target, farmers' training, as well as their training schedules. Every supply chain is also required to carry out various pilot projects, ranging from farmers' training on proper plantation management methods to enabling financial access and purchase protection.



Agritech & Digital Innovation



Palm Oil



Cocoa



Potato



Peanut



Rubber



Coffee



Coconut



Corn



Rice



Dairy



Cattle



Horticulture



Capacity Building



Women Empowerment



Living Income



Traceability



Regenerative Agriculture

PISAgro Secretariat

Insan Syafaat
Executive Director

Fathan Oktrisaf
Strategic Engagement Manager

Alicia Ceu
Strategic Engagement Specialist

Hendri Surya Widcaksana
Communications Manager

Nadia Fairus
Office Manager

Ferial Lubis
Government Relation Support Consultant

William Widjaja
Project Management & Social Media Officer

Haridi Walid
Intern

Sharaf Tariq
Intern

Prolog

Tahun Internasional Petani Perempuan 2026: Memberdayakan Perempuan untuk Membangun Sistem Pangan yang Tangguh

Hendri Surya W. *(Artikel ini ditulis dan dirangkum dari berbagai sumber)*



Penetapan tahun 2026 sebagai Tahun Internasional Petani Perempuan (*International Year of the Woman Farmer/ IYWF 2026*) menandai sebuah pengakuan global yang signifikan terhadap peran krusial yang dimainkan oleh perempuan dalam sektor pertanian dan sistem pangan. Dipimpin oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan kontribusi perempuan terhadap produksi pertanian, ketahanan pangan, nutrisi, mata pencaharian pedesaan, dan pembangunan berkelanjutan, sekaligus mengatasi kesenjangan gender yang terus berlanjut yang membatasi partisipasi penuh dan potensi mereka.

Di seluruh dunia, perempuan adalah aktor yang sangat penting dalam sistem agrifood,

dengan cakupan mencapai 41% dari total tenaga kerja agropangan global. Mereka berkontribusi pada sektor pertanian, produksi peternakan, perikanan, penanganan pasca-panen, pengolahan pangan, pemasaran, serta kecukupan gizi rumah tangga. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa perempuan mengisi 38 persen dari total tenaga kerja pertanian di negara ini, atau sekitar 14,81 juta orang. Perempuan telah lama memainkan peran esensial dalam mendukung produksi pertanian dan kesejahteraan keluarga, di mana mereka sering kali harus menyeimbangkan tanggung jawab sebagai petani, pengusaha, perawat keluarga, sekaligus pemimpin komunitas. Namun terlepas dari kontribusi tersebut, petani perempuan terus menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses sumber daya

produktif seperti kepemilikan tanah, pembiayaan, sarana produksi pertanian (*input*), layanan penyuluhan, teknologi, dan peluang pasar. Tantangan-tantangan ini menjadi semakin nyata seiring dengan meningkatnya dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian dan mata pencaharian di pedesaan.

Perubahan Iklim dan Meningkatnya Kerentanan Produksi Pangan

Pertanian tetap menjadi salah satu sektor yang paling sensitif terhadap variabilitas iklim dan fenomena cuaca ekstrem. Perubahan pola curah hujan, kekeringan yang berkepanjangan, banjir, kenaikan suhu, dan serangan wabah hama secara langsung memengaruhi jadwal tanam, produktivitas tanaman, serta pendapatan petani.

Fenomena El Niño yang terjadi dalam Fenomena El Niño baru-baru ini menyoroti kerentanan sistem produksi pangan di banyak negara, termasuk Indonesia. Penurunan curah hujan di beberapa wilayah pertanian mengganggu aktivitas penanaman dan meningkatkan kekhawatiran atas ketersediaan air untuk irigasi. Bagi para petani skala kecil yang sangat bergantung pada kondisi cuaca yang dapat diprediksi, ketidakpastian iklim ini dapat memengaruhi hasil produksi dan pendapatan rumah tangga secara signifikan.

Penilaian ilmiah dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) dan lembaga pemantau iklim global terus memperingatkan bahwa risiko-risiko terkait iklim diperkirakan akan semakin intensif dalam beberapa dekade mendatang. Oleh karena itu, memperkuat ketahanan sistem pertanian telah menjadi prioritas krusial demi memastikan ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan.

Adaptasi terhadap perubahan iklim kini bukan lagi sekadar aspirasi jangka

panjang, melainkan telah menjadi kebutuhan yang mendesak.

Petani Perempuan sebagai Penggerak Utama Adaptasi Iklim

Meskipun perempuan petani sering kali termasuk kelompok yang paling rentan terhadap dampak iklim, mereka juga merupakan salah satu agen perubahan terpenting dalam membangun ketahanan di tingkat rumah tangga dan komunitas.

Di berbagai komunitas pedesaan, perempuan semakin banyak yang mengadopsi dan mempromosikan praktik pertanian adaptif untuk mengatasi tantangan terkait iklim. Praktik-praktik ini meliputi diversifikasi tanaman, peningkatan manajemen tanah, teknik konservasi air, praktik pertanian berkelanjutan, hingga pemanfaatan informasi iklim sebagai panduan dalam mengambil keputusan masa tanam.

Perempuan juga memainkan peran kritis dalam mengelola ketahanan pangan dan nutrisi rumah tangga selama periode tekanan lingkungan dan ekonomi. Pengetahuan mereka tentang sistem pangan lokal, pengelolaan sumber daya, dan jaringan komunitas sering kali membantu keluarga dalam menghadapi gangguan akibat iklim.

Penelitian ekstensif dari FAO dan organisasi internasional lainnya secara konsisten menunjukkan bahwa memperkecil kesenjangan gender di sektor pertanian dapat menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi, meningkatkan ketahanan pangan, memperkuat ekonomi pedesaan, serta membangun ketahanan yang lebih besar terhadap guncangan iklim. Ketika perempuan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, pelatihan, keuangan, teknologi, dan pasar, mereka berada dalam posisi yang lebih baik untuk berinvestasi dalam kegiatan produktif dan menerapkan praktik pertanian cerdas iklim (*climate-smart agriculture*).

Oleh karena itu, memberdayakan perempuan petani bukan hanya tentang kesetaraan gender

semata, melainkan sebuah investasi esensial dalam ketahanan pertanian dan sistem pangan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan global. Studi menunjukkan bahwa jika perempuan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya seperti halnya laki-laki, mereka dapat meningkatkan hasil panen di lahan mereka sebesar 20–30%, yang berpotensi mengurangi jumlah orang kelaparan di dunia sebesar 12–17%.

Membangun Sistem Pangan yang Inklusif dan Tangguh terhadap Iklim

Mengatasi tantangan iklim memerlukan tindakan yang terkoordinasi antara pemerintah, pelaku sektor swasta, organisasi petani, masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan lembaga penelitian.

Seiring dengan meningkatnya paparan sistem pangan terhadap risiko iklim, terdapat kebutuhan yang mendesak untuk memastikan bahwa perempuan petani dilibatkan secara penuh dalam upaya adaptasi dan pembangunan ketahanan. Hal ini mencakup perluasan akses terhadap:

- Teknologi pertanian cerdas iklim (*climate-smart agriculture*);
- Layanan penyuluhan dan pendampingan pertanian;
- Sistem informasi cuaca dan iklim;
- Layanan keuangan dan asuransi pertanian;
- Sarana produksi berkualitas dan praktik budidaya berkelanjutan;
- Peluang pasar dan partisipasi dalam rantai nilai;
- Pengembangan kepemimpinan dan ruang pengambilan keputusan.

Kemitraan multipihak yang inklusif menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa petani perempuan dapat memperoleh manfaat dari inovasi sekaligus berkontribusi

dalam membentuk sistem pangan yang lebih berkelanjutan.

Bagi organisasi dan platform yang bergerak di seluruh rantai nilai pertanian, berinvestasi dalam pemberdayaan perempuan dapat menghasilkan manfaat yang melampaui skala rumah tangga individu. Partisipasi perempuan yang lebih kuat dalam pertanian dapat meningkatkan produktivitas, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan ketahanan komunitas, dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas di mana semua hal ini secara langsung memerangi malnutrisi dengan cara meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mempromosikan produksi tanaman yang beragam serta kaya nutrisi.

Seruan Aksi untuk Masa Depan Pertanian

Tahun Perempuan Petani Internasional 2026 menawarkan peluang penting untuk mengakui kontribusi perempuan petani sekaligus mempercepat upaya dalam mengatasi hambatan struktural yang terus membatasi kesempatan mereka. Berbagai studi, seperti laporan *The Unjust Climate* dari FAO, menunjukkan bahwa perempuan berada di garis depan dalam menghadapi dampak iklim, sehingga pengetahuan adaptif dan kepemimpinan mereka mutlak menjadi hal yang sangat esensial.

Perubahan iklim memaksa kita untuk memikirkan kembali secara global tentang bagaimana cara kita menanam dan mengamankan pangan kita. Perempuan petani adalah kekuatan pendorong di balik pergeseran global dalam adaptasi iklim dan inovasi pertanian. Pengalaman, pengetahuan, dan kepemimpinan mereka adalah hal yang paling kritis dalam membantu komunitas mengamankan pasokan pangan dan melindungi diri dari ketidakpastian iklim. Membangun sistem pangan yang tangguh membutuhkan lebih dari sekadar inovasi teknologi atau reformasi kebijakan semata. Hal ini membutuhkan pemberdayaan terhadap orang-orang yang menopang pertanian

setiap harinya. Dengan berinvestasi pada perempuan petani dan memastikan akses yang setara terhadap sumber daya, peluang, serta proses pengambilan keputusan, para pemangku kepentingan di seluruh sektor agrifood dapat berkontribusi pada masa depan yang lebih inklusif, produktif, dan berketahanan iklim.

Saat dunia merayakan Tahun Perempuan Petani Internasional 2026, pesannya sudah sangat jelas: memberdayakan perempuan petani tidak hanya esensial untuk mencapai kesetaraan gender, tetapi juga merupakan hal yang fundamental demi mengamankan masa depan pangan kita.

Dikutip dari berbagai sumber referensi:

1. *Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (International Year of the Woman Farmer 2026; The State of Food and Agriculture; The State of Food Security and Nutrition in the World 2024–2025; Climate-Smart Agriculture publications),*
2. *Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) (Resolution proclaiming the International Year of the Woman Farmer 2026),*
3. *Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Statistik Pertanian 2024–2025; inisiatif Climate-Smart Agriculture; program pemberdayaan dan penyuluhan petani),*
4. *Badan Pusat Statistik (BPS) (Statistik Gender Indonesia 2024–2025; Statistik Tenaga Kerja Pertanian; Statistik Produksi Tanaman Pangan).*
5. *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) (Pangarusutamaan Gender dalam Program Pertanian dan Pembangunan Pedesaan; Inisiatif Pemberdayaan Ekonomi Perempuan).*
6. *UN Women (Women's Empowerment in Rural Development and Food Systems; Gender Equality and Climate Resilience Frameworks).*
7. *Bank Dunia (World Bank) (Gender in Agriculture Sourcebook; Women, Agriculture and Climate Change; Indonesia Climate and Development Reports).*
8. *International Fund for Agricultural Development (IFAD) (Rural Women's Economic Empowerment; Smallholder Resilience and Climate Adaptation Programs).*
9. *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (Sixth Assessment Report (AR6): Impacts, Adaptation and Vulnerability; Climate Change and Food Systems).*
10. *World Meteorological Organization (WMO) (State of the Global Climate Reports 2024–2025; El Niño and Climate Variability Updates).*
11. *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (Gender Equality in Agriculture and Rural Development; OECD–FAO Agricultural Outlook 2025–2034).*
12. *United Nations Development Programme (UNDP) (Climate Adaptation and Resilient Livelihoods; Gender-responsive Climate Action*

Prologue

International Year of the Woman Farmer 2026: Empowering Women to Build Resilient Food Systems

Hendri Surya W. *(This article is written and compiled from various sources)*



Designation of 2026 as the International Year of the Woman Farmer (IYWF 2026) marks a significant global recognition of the critical role women play in agriculture and food systems. Led by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), this observance seeks to raise awareness of women's contributions to agricultural production, food security, nutrition, rural livelihoods, and sustainable development while addressing the persistent gender gap that continue to limit their full participation and potential.

Across the world, women are indispensable actors in agrifood systems, comprising 41% of the global agrifood workforce. They contribute to farming, livestock production, fisheries, post-harvest handling, food processing,

marketing, and household nutrition. In Indonesia, Statistics Indonesia (BPS) recorded that women make up 38 percent of the country's agricultural workforce, or around 14.81 million people. Women have long played an essential role in supporting agricultural production and family welfare, often balancing responsibilities as farmers, entrepreneurs, caregivers, and community leaders. Yet despite their contributions, women farmers continue to face barriers in accessing productive resources such as land ownership, financing, agricultural inputs, extension services, technology, and market opportunities. These challenges become even more pronounced as climate change increasingly affects agricultural production and rural livelihoods.

Climate Change and the Growing Vulnerability of Food Production

Agriculture remains one of the sectors most sensitive to climate variability and extreme weather events. Changes in rainfall patterns, prolonged droughts, floods, rising temperatures, and pest outbreaks directly affect planting schedules, crop productivity, and farmer incomes.

The recent El Niño phenomenon highlighted the vulnerability of food production systems across many countries, including Indonesia. Reduced rainfall in several agricultural regions disrupted planting activities and increased concerns over water availability for irrigation. For smallholder farmers who rely heavily on predictable weather conditions, climate uncertainty can significantly affect production outcomes and household income.

Scientific assessments from the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and global climate monitoring agencies continue to warn that climate-related risks are expected to intensify in the coming decades. As a result, strengthening the resilience of agricultural systems has become a critical priority for ensuring food security and sustainable rural development.

Climate adaptation is no longer simply a long-term aspiration, it has become an immediate necessity.

Women Farmers as Key Drivers of Climate Adaptation

While women farmers are often among the most vulnerable to climate impacts, they are also among the most important agents of change in building resilience at the household and community levels.

Across rural communities, women are increasingly adopting and promoting adaptive agricultural practices to cope with climate-related challenges. These include crop diversification, improved soil management, water conservation techniques, sustainable farming practices, and the use of climate information to guide planting decisions.

Women also play a critical role in managing household food security and nutrition during periods of environmental and economic stress. Their knowledge of local food systems, resource management, and community networks often helps families navigate climate-related disruptions.

Extensive research from the FAO and other international organizations consistently shows that closing gender gaps in agriculture can lead to higher productivity, improved food security, stronger rural economies, and greater resilience to climate shocks. When women have equitable access to resources, training, finance, technology and market, they are better positioned to invest in productive activities and implement climate-smart agricultural practices.

Empowering women farmers is therefore not only about the gender equality, it is an essential investment in agricultural resilience and sustainable food systems to support the global food security. The studies show that if women had the same access to resources as men, they could increase yields on their farms by 20–30%, potentially reducing the number of hungry people in the world by 12–17%.

Building Inclusive and Climate-Resilient Food Systems

Addressing climate challenges requires coordinated action among governments, private sector actors, farmer organizations, civil society, development partners, and research institutions.

As food systems become increasingly exposed to climate risks, there is a growing need to

ensure that women farmers are fully included in adaptation and resilience-building efforts. This includes expanding access to:

- Climate-smart agricultural technologies;
- Agricultural extension and advisory services;
- Weather and climate information systems;
- Financial services and agricultural insurance;
- Quality inputs and sustainable farming practices;
- Market opportunities and value chain participation;
- Leadership development and decision-making platforms.

Inclusive multi-stakeholder partnerships are essential to ensuring that women farmers can benefit from innovation and contribute to shaping more sustainable food systems.

For organizations and platforms working across agricultural value chains, investing in women's empowerment can generate benefits that extend beyond individual households. Stronger participation of women in agriculture can improve productivity, strengthen food security, enhance community resilience, and support broader sustainable development objectives, all of which directly combat malnutrition by increasing household income and promoting the production of diverse, nutrient-rich crops.

A Call to Action for the Future of Agriculture

The International Year of the Woman Farmer 2026 offers an important opportunity to recognize the contributions of women farmers while accelerating efforts to address structural barriers that continue to limit their opportunities. Studies, such as FAO's *The Unjust Climate* report, show that women are on the front lines of climate impacts, making their adaptive knowledge and leadership

absolutely is very essential.

Climate change is forcing a global rethink of how we grow and secure our food. Women farmers are the driving force behind the global shift in climate adaptation and agricultural innovation. Their experiences, knowledge, and leadership are the most critical in helping communities to secure food supplies and protect from the climate uncertainty. Building resilient food systems requires more than technological innovation or policy reform alone. It requires empowering the people who sustain agriculture every day. By investing in women farmers and ensuring equitable access to resources, opportunities, and decision-making processes, stakeholders across the agrifood sector can contribute to a more inclusive, productive, and climate-resilient future.

As the world celebrates the International Year of the Woman Farmer 2026, the message is clear: empowering women farmers is not only essential for achieving gender equality, it is fundamental to securing the future of food.

Cited from Various Reference Sources:

1. *Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (International Year of the Woman Farmer 2026; The State of Food and Agriculture; The State of Food Security and Nutrition in the World 2024–2025; Climate-Smart Agriculture publications),*
2. *United Nations General Assembly (UNGA) (Resolution proclaiming the International Year of the Woman Farmer 2026),*
3. *Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia (Agricultural Statistics 2024–2025; Climate-Smart Agriculture initiatives; Farmer empowerment and extension programs),*
4. *Statistics Indonesia (BPS) (Indonesia*

Gender Statistics 2024–2025; Agricultural Labor Statistics; Food Crop Production Statistics).

5. *Ministry of Women Empowerment and Child Protection (KPPPA) (Gender Mainstreaming in Agriculture and Rural Development Programs; Women's Economic Empowerment Initiatives).*
6. *UN Women (Women's Empowerment in Rural Development and Food Systems; Gender Equality and Climate Resilience Frameworks).*
7. *World Bank (Gender in Agriculture Sourcebook; Women, Agriculture and Climate Change; Indonesia Climate and Development Reports).*
8. *International Fund for Agricultural Development (IFAD) (Rural Women's Economic Empowerment; Smallholder Resilience and Climate Adaptation Programs).*
9. *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (Sixth Assessment Report (AR6): Impacts, Adaptation and Vulnerability; Climate Change and Food Systems).*
10. *World Meteorological Organization (WMO) (State of the Global Climate Reports 2024–2025; El Niño and Climate Variability Updates).*
11. *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (Gender Equality in Agriculture and Rural Development; OECD–FAO Agricultural Outlook 2025–2034).*
12. *United Nations Development Programme (UNDP) (Climate Adaptation and Resilient Livelihoods; Gender-responsive Climate Action)*

Upaya-upaya untuk Mencapai Swasembada Jagung Nasional

Ferial Lubis (Artikel ini ditulis dan diolah dari data Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Pusat Statistik/BPS)

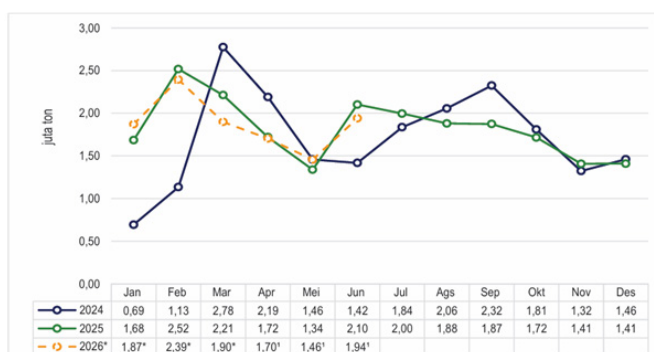


Produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 28 persen (JPK-KA28persen) pada Maret 2026 sebanyak 1,90 juta ton, mengalami penurunan sebanyak 0,31 juta ton (14,23 persen) dibandingkan Maret 2025 yang sebanyak 2,21 juta ton. Sementara itu, berdasarkan amatan fase tumbuh pada hasil Survei KSA Maret 2026, potensi produksi JPK-KA28persen pada April-Juni 2026 diperkirakan sebanyak 5,10 juta ton (Gambar 1). Total produksi JPK-KA28persen pada Januari-Juni 2026 diperkirakan sebanyak 11,26 juta ton, mengalami penurunan sebanyak 0,31 juta ton (2,69 persen) dibandingkan Januari-Juni 2025 yang sebanyak 11,58 juta ton.

Total produksi jagung tahun 2025 dengan KA 28 persen sebesar 21,86 juta ton meningkat sebesar 1,38 juta ton atau 6,7persen

dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 20,48 juta ton.

Gambar 1. Perkembangan Produksi Jagung Pipilan Kering Kadar Air 28 Persen (JPK-KA 28persen) di Indonesia (juta ton), 2024–2026





Sumber: Berita Resmi Statistik, No. 47/05/Th. XXIX, 4 Mei 2026

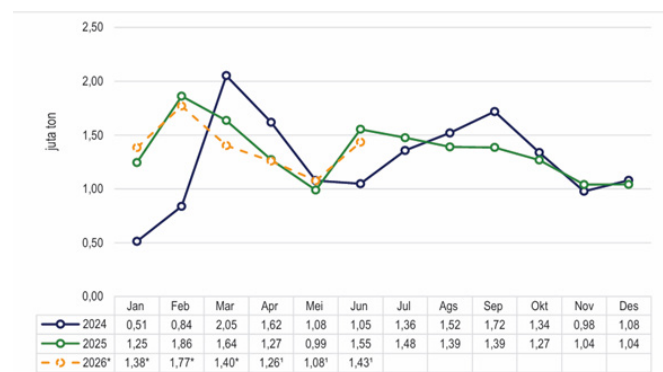
Catatan: *: Angka sementara, 1: Angka potensi. Perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan angka

Produksi Jagung Pipilan Kering Kadar Air 14 Persen (JPK-KA14persen)

Jika produksi jagung dikonversikan ke produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen (JPK-KA14persen), produksi JPK-KA14persen pada Maret 2026 sebanyak 1,40 juta ton atau mengalami penurunan sebanyak 0,23 juta ton (14,23 persen) dibandingkan Maret 2025 yang sebanyak 1,64 juta ton (Gambar 2).

Sementara itu, potensi produksi JPK-KA14persen pada April–Juni 2026 diperkirakan sebanyak 3,77 juta ton. Dengan demikian, total produksi JPK-KA14persen pada Januari–Juni 2026 diperkirakan sebanyak 8,33 juta ton. Sepuluh provinsi sentra produksi JPK-KA14persen pada Januari–Juni 2026 adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Gorontalo, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Gambar 2. Perkembangan Produksi Jagung Pipilan Kering Kadar Air 14 Persen (JPK KA14persen) di Indonesia (juta ton), 2024–2026



Sumber: Berita Resmi Statistik, No. 47/05/Th. XXIX, 4 Mei 2026

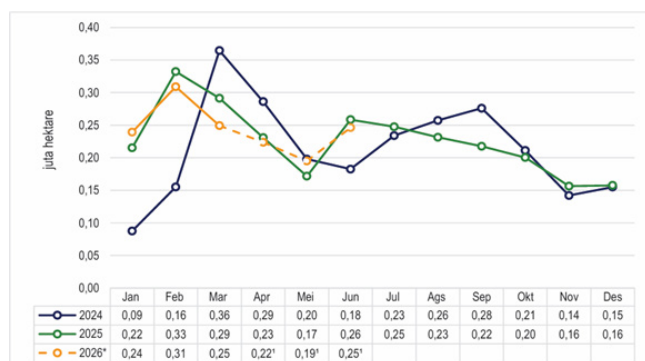
Catatan: *: Angka sementara, 1: Angka potensi. Perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan angka

Total produksi jagung tahun 2025 dengan KA 14 persen sebesar 16,17 juta ton meningkat sebesar 0,99 juta ton atau 6,5persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 15,18 juta ton. Mengutip data dari Badan Pangan Nasional, konsumsi Jagung Pipilan kering (JPK) 14 persen selama 2025 berada di kisaran 15,64 juta ton, sehingga terdapat surplus sekitar sekitar 0,53 juta ton.

Luas Panen Jagung

Berdasarkan hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA) Jagung amatan Maret 2026, realisasi luas panen jagung pipilan pada Maret 2026 sebesar 0,25 juta hektare, atau mengalami penurunan sekitar 0,04 juta hektare (14,44 persen) dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 0,29 juta hectare. Total luas panen tahun 2025 sebesar 2,72 juta hectare meningkat sebesar 0,17 juta hectare atau 6,7persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 2,55 juta hectare.

Gambar 3. Perkembangan Luas Panen Jagung Pipilan di Indonesia (juta hektare), 2024 - 2026



Sumber: Berita Resmi Statistik, No. 47/05/Th. XXIX, 4 Mei 2026

Catatan: *: Angka sementara, 1: Angka potensi. Perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan angka

Sementara itu, potensi luas panen jagung pipilan pada April Juni 2026 diperkirakan sebesar 0,66 juta hektare. Dengan demikian, total luas panen jagung pipilan pada Januari–Juni 2026 diperkirakan sebesar 1,46 juta hektare, atau mengalami penurunan sebesar 0,04 juta hektare (2,51 persen) dibandingkan luas panen pada Januari–Juni 2025 yang sebesar 1,50 juta hektare.

Importasi Jagung

Pada tahun 2024 volume impor jagung tercatat sebesar 2,013 juta ton dan pada tahun 2025 menurun sekitar 51persen menjadi 0,98 juta ton. Importasi paling besar tahun 2024 berasal dari HS 10059091 ‘Selain jagung brondong, layak untuk dikonsumsi manusia’(74,02persen); HS 10059099 ‘Selain jagung brondong, dan selain untuk dikonsumsi manusia’ (12,54persen) serta 11081200 ‘Pati jagung’ (12,38persen).

Importasi HS 10059091 ‘Selain jagung brondong, layak untuk dikonsumsi manusia’ tetap yang paling besar volumenya sekitar 90,41persen dari total importasi jagung tahun 2025; disusul HS 11081200 ‘Pati jagung’ (7,57persen) dan HS 11031300 ‘Menir dan tepung kasar dari jagung’ sebesar 1,07persen. Mengutip pernyataan Kepala Badan Pangan Nasional (Andi Amran Sulaiman) Indonesia sudah swasembada jagung untuk pakan. Impor jagung pakan sudah nol persen.

Keragaan Harga Jagung

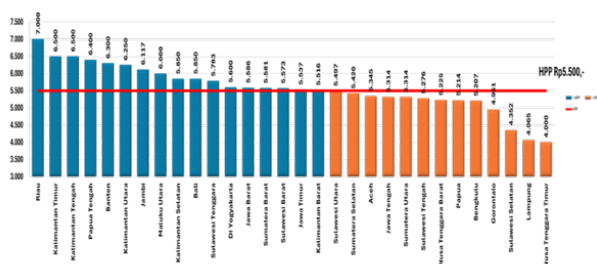
Sebagai bentuk perlindungan, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 216 Tahun 2025 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2025. HPP jagung pipilan kering di tingkat petani ditetapkan Rp 5.500 per kilogram untuk kadar air 18–20 persen, sementara HPP Rp 6.400 per kilogram berlaku di gudang Bulog untuk kadar air maksimal 14 persen dan aflatoksin maksimal 50 part per billion (ppb).

Harga rata-rata jagung kering panen tercatat Rp 5.608,-/kg atau lebih tinggi sebesar 1,96persen dari HPP Rp5.500,-/kg, dan turun sebesar 2,01persen dibandingkan tanggal sebelumnya. Harga tertinggi sebesar Rp 7.000,- /kg berada di Provinsi Papua Barat & Papua Tengah dan harga terendah sebesar Rp 4.189,- /kg berada di Provinsi Lampung.

Adapun, hingga 15 November 2025, realisasi

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung telah mencapai 51,2 ribu ton dan disalurkan kepada 3.578 peternak ayam ras petelur di 17 provinsi. Ini demi memastikan pasokan pakan tetap terjaga.

Gambar 4. Harga Jagung Pipilan Kering di Tingkat Petani 15 Januari 2026



Sumber: Ditjen Tanaman Pangan, Kementan, 2026

Proyeksi Produksi Jagung 2026

Sesuai proyeksi Neraca Pangan Nasional yang disusun Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Kementerian dan Lembaga terkait, stok carry over dari 2025 ke 2026 mencapai 4,5 juta ton. Jumlah tersebut cukup untuk memenuhi hampir tiga bulan kebutuhan nasional, dengan kebutuhan bulanan sekitar 1,4 juta ton. Hal ini dapat menjadi penanda bahwa Indonesia pada 2025 telah berada dalam kondisi swasembada jagung. Sepanjang tahun, kebutuhan jagung pakan dapat dipenuhi tanpa ketergantungan impor. Berdasarkan kondisi ini, salah satu kebijakan Pemerintah adalah tidak akan mengimpor jagung sepanjang tahun 2026 karena Pemerintah menilai pasokan dalam negeri sudah cukup untuk menjawab seluruh kebutuhan nasional (baik untuk pakan, benih, maupun konsumsi rumah tangga).

Mengutip pernyataan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, produksi jagung nasional sepanjang 2026 diperkirakan mencapai

18 juta ton, dengan tambahan produksi ini, keseimbangan pasokan diproyeksikan tetap terjaga sepanjang tahun. Dengan proyeksi tersebut, stok jagung di akhir 2026 diperkirakan tetap berada di kisaran 4,5 juta ton. Pemerintah menilai posisi ini cukup aman untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga. Hal ini membuka peluang ekspor, pada 2026, ekspor jagung diperkirakan dapat mencapai sekitar 52,9 ribu ton, tanpa mengganggu pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Kebijakan Pemerintah

Terkait dengan peningkatan produksi jagung menuju swasembada jagung maka telah terbit “Inpres Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah Tahun 2026–2029”. Dalam Inpres 3/2026 ini memuat direktif Presiden untuk melaksanakan pengadaan jagung dalam negeri sepanjang tahun 2026. Instruksi ini mengatur tentang pengadaan dan pengelolaan jagung dalam negeri serta penyaluran cadangan jagung pemerintah tahun 2026–2029. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan ketersediaan, stabilitas pasokan, dan keterjangkauan harga jagung guna mendukung ketahanan pangan nasional serta menjamin keberlanjutan sektor peternakan dan industri berbasis jagung.

Instruksi Presiden ini memberikan arahan kepada kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan langkah-langkah terpadu dalam perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi jagung. Ruang lingkup pengaturan mencakup penguatan produksi dalam negeri, optimalisasi cadangan jagung pemerintah, serta mekanisme penyaluran untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan di pasar. Melalui Instruksi Presiden ini, diharapkan tercipta sinergi kebijakan lintas sektor dalam pengelolaan komoditas jagung secara efektif dan efisien, guna mendukung ketahanan pangan nasional dan stabilitas ekonomi.

Untuk pengadaan jagung tahun 2027 sampai 2029 ditetapkan berdasarkan rapat koordinasi bidang pangan pada tahun berjalan. Pengadaan jagung dalam negeri yang dimaksud dalam Inpres ini ditugaskan kepada Perum Bulog untuk penguatan stok Cadangan Jagung Pemerintah (CJP).

Lebih lanjut, Inpres 3/2026 juga menetapkan penyaluran CJP dapat dilakukan melalui operasi pasar umum atau pasar khusus pada sasaran tertentu. Namun tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan jagung pakan untuk peternak mandiri dan kebutuhan pasokan jagung bahan baku pakan ternak bagi pabrik pakan ternak. Dengan itu, stok CJP di Perum Bulog pun terus diperkuat.

CJP dan SPHP

Melalui penugasan dari Bapanas, sepanjang tahun 2025 pengadaan jagung yang bersumber dari produksi dalam negeri mencapai 101 ribu ton. Untuk penyaluran CJP telah terlaksana melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan sebanyak 51,2 ribu ton ke 3.578 peternak unggas di 17 provinsi. Stok CJP hingga akhir 2025 masih 45 ribu ton.

Selanjutnya angka stok CJP di kuartal pertama tahun 2026 telah mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini berkat realisasi pengadaan jagung dalam negeri yang hingga 2 April telah mencapai 125,2 ribu ton atau mencapai 123,9 persen dibandingkan realisasi pengadaan tahun 2025. Stok CJP pun saat ini telah berada di angka 168 ribu ton.

Terkait penyaluran CJP untuk tahun 2026 ini, mengutip pernyataan Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, program SPHP jagung pakan telah tersedia anggarannya dan siap dilaksanakan. Total alokasi salur CJP mencapai 242 ribu ton untuk membantu peternak unggas dan nonunggas dalam memperoleh jagung pakan berkualitas dengan harga lebih terjangkau. Bapanas bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, menyiapkan data peternak unggas dan

nonunggas yang akan menjadi penerima program SPHP jagung pakan tahun 2026.

Peranan PISAgro mendukung Program Swasembada Jagung

1. Agar berperan dalam menciptakan varietas jagung hibrida dan benih bioteknologi yang tahan hama dan memiliki produktivitas tinggi per hektarnya. Inovasi ini dapat membantu petani untuk memanen jagung dalam jumlah yang lebih besar dan kualitas yang lebih seragam.
2. Memberikan penyuluhan dan edukasi terutama kepada petani binaannya terutama mengenai praktik pemupukan yang seimbang dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).
3. Agar secara kontinue berinteraksi dengan petani jagung binaannya untuk menyerap hasil panen, membantu sebagai penyedia modal petani, penyedia alat dan mesin pertanian modern (tractor, dryer dan silo penyimpanan) dan menjembatani kerjasama antara petani jagung dengan industri pakan dan pangan.
4. Berperan sebagai *off-taker* untuk menjamin kepastian pasar dengan membeli hasil panen petani dengan harga yang layak atau sesuai HPP. Secara berkala memonitor harga jual ditingkat petani.

Referensi

1. Berita Resmi Statistik No.47/05/Th.XXIX, 4 Mei 2026.
2. Siaran Pers Badan Pangan Nasional (Bapanas) 207/R-BAPANAS/IV/2026, 5 April 2026

Various Efforts to Achieve National Corn Self-Sufficiency

Ferial Lubis (This article is written and compiled from datas from National Food Agency (Bapanas) and Statistics Indonesia/BPS)

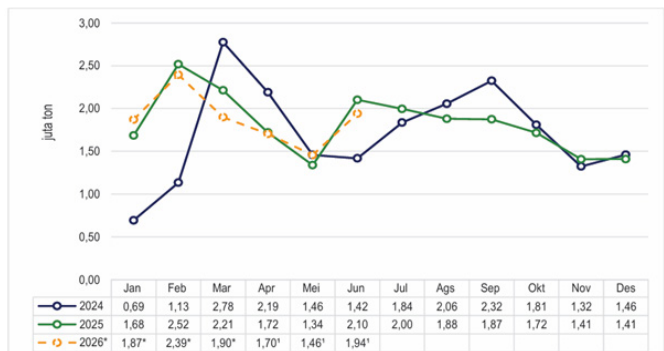


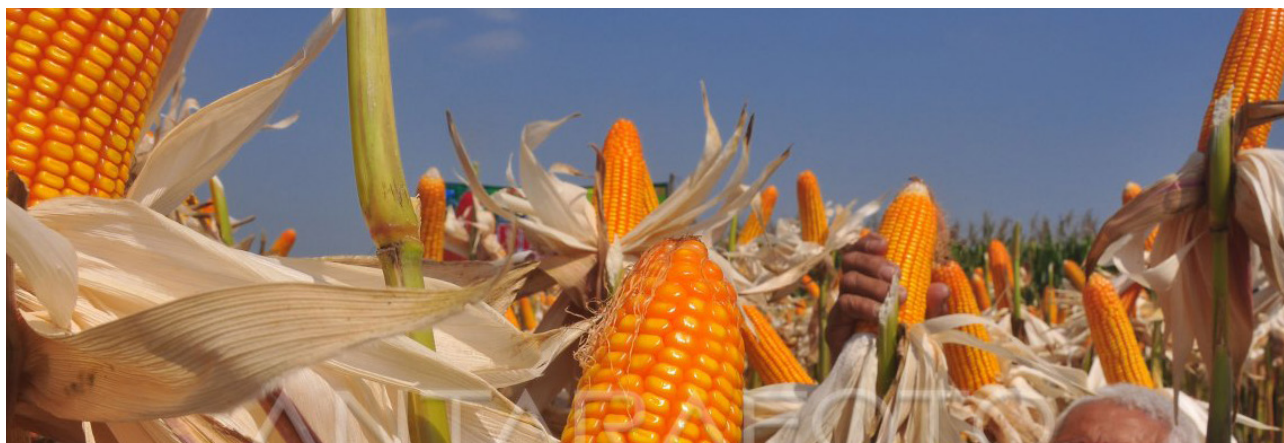
Dry shelled corn production with 28 percent moisture content (JPK-KA 28%) in March 2026 reached 1.90 million tons, representing a decrease of 0.31 million tons (14.23 percent) compared to March 2025, which recorded 2.21 million tons. Meanwhile, based on crop growth phase observations from the March 2026 Area Sampling Frame Survey (KSA), the potential production of JPK-KA 28% for April–June 2026 is estimated at 5.10 million tons (Figure 1). Total JPK-KA 28% production during January–June 2026 is projected at 11.26 million tons, declining by 0.31 million tons (2.69 percent) compared to the 11.58 million tons recorded during January–June 2025.

Total corn production in 2025 with 28 percent moisture content reached 21.86 million tons,

an increase of 1.38 million tons or 6.7 percent compared to 2024, when production stood at 20.48 million tons.

Figure 1. Development of Dry Shelled Corn Production with 28 Percent Moisture Content (JPK-KA 28%) in Indonesia (Million Tons), 2024–2026





Source: Official Statistics Release No. 47/05/Th. XXIX, May 4, 2026

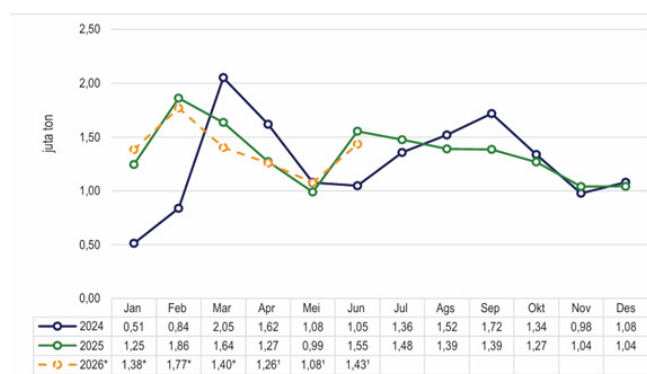
Notes: *: Preliminary figures, 1: Potential figures. Differences in decimal values are due to rounding

Dry Shelled Corn Production with 14 Percent Moisture Content (JPK-KA 14%)

When corn production is converted into dry shelled corn production with 14 percent moisture content (JPK-KA 14%), production in March 2026 amounted to 1.40 million tons, decreasing by 0.23 million tons (14.23 percent) compared to March 2025, which reached 1.64 million tons (Figure 2).

Meanwhile, potential JPK-KA 14% production during April–June 2026 is estimated at 3.77 million tons. Consequently, total JPK-KA 14% production during January–June 2026 is projected at 8.33 million tons. The ten leading provinces for JPK-KA 14% production during January–June 2026 are East Java, Central Java, Lampung, South Sulawesi, North Sumatra, West Nusa Tenggara, West Java, Gorontalo, West Sumatra, and East Nusa Tenggara.

Figure 2. Development of Dry Shelled Corn Production with 14 Percent Moisture Content (JPK-KA 14%) in Indonesia (Million Tons), 2024–2026



Source: Official Statistics Release No. 47/05/Th. XXIX, May 4, 2026

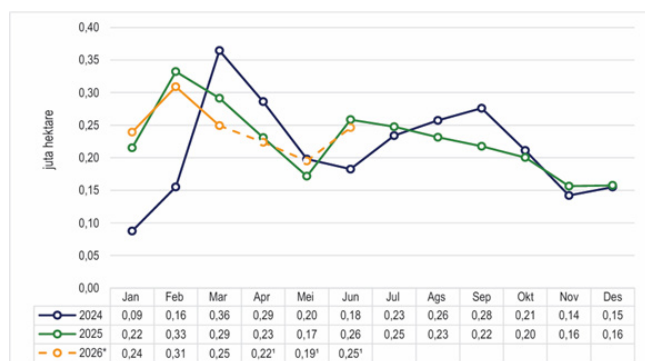
Notes: *: Preliminary figures, 1: Potential figures. Differences in decimal values are due to rounding

Total corn production in 2025 with 14 percent moisture content reached 16.17 million tons, increasing by 0.99 million tons or 6.5 percent compared to 2024, when production totaled 15.18 million tons. According to data from the National Food Agency, consumption of dry shelled corn (JPK) with 14 percent moisture content during 2025 was approximately 15.64 million tons, resulting in a surplus of around 0.53 million tons.

Corn Harvested Area

Based on the results of the March 2026 Corn Area Sampling Frame Survey (KSA), the realized harvested area of shelled corn in March 2026 reached 0.25 million hectares, representing a decline of approximately 0.04 million hectares (14.44 percent) compared to March 2025, which recorded 0.29 million hectares. The total harvested area in 2025 reached 2.72 million hectares, an increase of 0.17 million hectares or 6.7 percent compared to 2024, when it stood at 2.55 million hectares.

Figure 3. Development of Shelled Corn Harvested Area in Indonesia (Million Hectares), 2024–2026



Source: Official Statistics Release No. 47/05/Th. XXIX, May 4, 2026

Notes: *: Preliminary figures, 1: Potential figures. Differences in decimal values are due to rounding

Meanwhile, the potential harvested area of shelled corn during April–June 2026 is estimated at 0.66 million hectares. Thus, total harvested area during January–June 2026 is projected at 1.46 million hectares, decreasing by 0.04 million hectares (2.51 percent) compared to the January–June 2025 harvested area of 1.50 million hectares.

Corn Imports

In 2024, corn import volume reached 2.013 million tons. In 2025, imports declined by approximately 51 percent to 0.98 million tons. The largest import category in 2024 was HS 10059091, “Other than popcorn, suitable for human consumption” (74.02 percent), followed by HS 10059099, “Other than popcorn and other than for human consumption” (12.54 percent), and HS 11081200, “Corn starch” (12.38 percent).

Imports under HS 10059091 remained the largest category in 2025, accounting for approximately 90.41 percent of total corn imports, followed by HS 11081200 “Corn starch” (7.57 percent) and HS 11031300 “Groats and coarse meal of maize” (1.07 percent). Quoting a statement from the Head of the National Food Agency, Andi Amran Sulaiman, Indonesia has achieved self-sufficiency in corn for animal feed. Imports of feed corn have reached zero percent.

Corn Price Performance

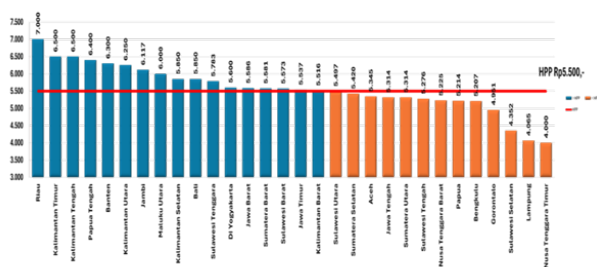
As a form of protection, the Government established the Government Purchase Price (HPP) for corn through National Food Agency Decree No. 216 of 2025 as a follow-up to Presidential Instruction No. 10 of 2025.

The HPP for dry shelled corn at the farmer level is set at IDR 5,500 per kilogram for moisture content of 18–20 percent. Meanwhile, an HPP of IDR 6,400 per kilogram applies at Bulog warehouses for corn with a maximum moisture content of 14 percent and a maximum aflatoxin level of 50 parts per billion (ppb).

The average harvested dry corn price was recorded at IDR 5,608 per kilogram, which is 1.96 percent higher than the HPP of IDR 5,500 per kilogram and 2.01 percent lower than the previous reporting date. The highest price, IDR 7,000 per kilogram, was recorded in West Papua and Central Papua Provinces, while the lowest price, IDR 4,189 per kilogram, was recorded in Lampung Province.

As of November 15, 2025, the implementation of the Food Supply and Price Stabilization Program (SPHP) for corn had reached 51.2 thousand tons and was distributed to 3,578 layer poultry farmers across 17 provinces, ensuring the continued availability of feed supplies.

Figure 4. Dry Shelled Corn Prices at the Farmer Level, January 15, 2026



Source: Directorate General of Food Crops, Ministry of Agriculture, 2026

Corn Production Projection for 2026

According to the National Food Balance projection prepared by the National Food Agency (Bapanas) together with relevant ministries and institutions, carry-over stocks from 2025 to 2026 are projected to reach 4.5 million tons. This amount is sufficient to meet nearly three months of national demand, with monthly demand averaging around 1.4 million tons. This can be considered an indication that Indonesia had achieved corn self-sufficiency in 2025. Throughout the year, feed corn demand could be met without reliance on imports. Based on these conditions, one of the Government’s policies is not to import corn throughout 2026, as domestic supply is considered sufficient to meet all national requirements, including feed, seed, and household consumption needs.

According to a statement from the Deputy for Food Availability and Stabilization at Bapanas, national corn production throughout 2026 is projected

to reach 18 million tons. With this additional production, supply balance is expected to remain secure throughout the year. Under this projection, end-of-year corn stocks in 2026 are expected to remain around 4.5 million tons. The Government considers this position sufficiently secure to maintain supply and price stability. This also opens opportunities for exports, with corn exports in 2026 projected to reach approximately 52.9 thousand tons without disrupting domestic supply fulfillment.

Government Policies

To support increased corn production toward self-sufficiency, the Government issued Presidential Instruction (Inpres) No. 3 of 2026 on the Procurement and Management of Domestic Corn and the Distribution of Government Corn Reserves for 2026–2029. This Presidential Instruction contains directives from the President to implement domestic corn procurement throughout 2026. It regulates the procurement and management of domestic corn as well as the distribution of Government Corn Reserves (CJP) during 2026–2029. The policy was introduced in response to the need to enhance corn availability, supply stability, and price affordability in order to support national food security while ensuring the sustainability of the livestock and corn-based industries.

The Presidential Instruction provides guidance to ministries and agencies, regional governments, and other stakeholders to undertake integrated actions in planning, procurement, storage, and distribution of corn. The scope of regulation includes strengthening domestic production, optimizing government corn reserves, and establishing distribution mechanisms to maintain market supply and price stability. Through this Presidential Instruction, greater cross-sector policy synergy is expected in managing corn commodities effectively and efficiently, thereby supporting national food security and economic stability.

Domestic corn procurement targets for 2027–2029 will be determined through annual food-sector coordination meetings. Procurement under this Presidential Instruction is assigned to Perum Bulog to strengthen Government Corn Reserve (CJP) stocks.

Furthermore, Inpres No. 3/2026 stipulates that CJP distribution may be conducted through general market operations or targeted special-market operations. Distribution includes, but is not limited to, meeting feed corn requirements for independent livestock farmers and supplying feed corn raw materials to feed mills. Consequently, CJP stocks at Perum Bulog continue to be strengthened.

Government Corn Reserves (CJP) and SPHP

Through assignments from Bapanas, domestic corn procurement during 2025 reached 101 thousand tons. Distribution of Government Corn Reserves (CJP) was implemented through the SPHP feed corn program, distributing 51.2 thousand tons to 3,578 poultry farmers in 17 provinces. CJP stocks at the end of 2025 remained at 45 thousand tons. In the first quarter of 2026, CJP stocks increased significantly. This was driven by domestic corn procurement, which as of April 2 had reached 125.2 thousand tons, equivalent to 123.9 percent of the total procurement achieved in 2025. Consequently, current CJP stocks have reached 168 thousand tons.

Regarding CJP distribution in 2026, according to the Deputy for Food Availability and Stabilization at Bapanas, funding for the SPHP feed corn program has been allocated and is ready for implementation. Total CJP distribution allocation amounts to 242 thousand tons to assist poultry and non-poultry farmers in obtaining quality feed corn at more affordable prices. Bapanas is collaborating with the Directorate General of Livestock and Animal Health Services and the Directorate General of Food Crops of the Ministry of Agriculture to prepare data on poultry and non-poultry farmers who will become beneficiaries of the 2026 SPHP feed corn program.

PISAgro's Role in Supporting the Corn Self-Sufficiency Program

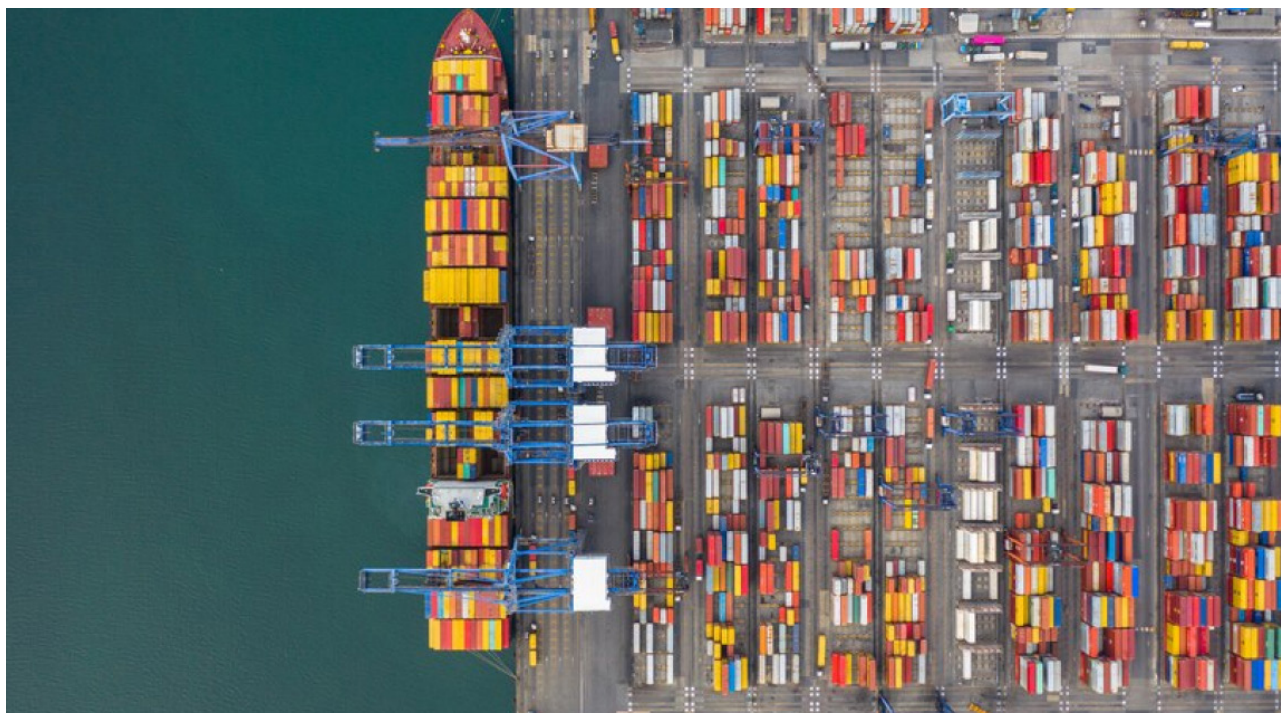
1. PISAgro can contribute by supporting the development of hybrid corn varieties and biotechnology seeds that are resistant to pests and have high productivity per hectare. These innovations can help farmers achieve larger harvests with more uniform quality.
2. PISAgro can also provide extension services and education, particularly for its assisted farmers, focusing on balanced fertilization practices and Integrated Pest Management (IPM) for controlling Plant Pest Organisms (OPT).
3. Furthermore, PISAgro can continuously engage with its partner corn farmers by absorbing harvest outputs, facilitating access to financing, providing modern agricultural machinery and equipment (tractors, dryers, and storage silos), and bridging partnerships between corn farmers and the feed and food industries.
4. PISAgro may also act as an off-taker to ensure market certainty by purchasing farmers' harvests at fair prices or according to the Government Purchase Price (HPP), while periodically monitoring farm-gate selling prices.

References

1. Official Statistics Release No. 47/05/Th. XXIX, May 4, 2026.
2. National Food Agency (Bapanas) Press Release No. 207/R-BAPANAS/IV/2026, April 5, 2026

Memahami DHE SDA dan DSI: Implikasinya bagi Stabilitas Ekonomi, Rantai Pasok, dan Petani Kelapa Sawit Indonesia

Hendri Surya W. *(Artikel ini ditulis dan dirangkum dari berbagai sumber)*



Di tengah dinamika ekonomi global yang terus berkembang, berbagai negara berupaya memperkuat ketahanan ekonominya melalui pengelolaan sumber daya dan perdagangan internasional yang semakin efektif. Indonesia pun terus melakukan berbagai langkah untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi dari ekspor sumber daya alam melalui penguatan tata kelola Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026, serta pengoperasian PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Bagi sektor pertanian nasional, khususnya industri kelapa sawit dan produk turunannya yang menjadi jangkar penyumbang devisa terbesar, babak baru ini menandai momentum penting. Transformasi ini tidak

hanya mendefinisikan ulang alur sirkulasi valuta asing, tetapi juga membawa dampak berkelanjutan bagi efisiensi rantai pasok, kepastian investasi hilir, hingga perlindungan kesejahteraan petani swadaya di hulu.

Arsitektur Baru DHE SDA dan Dukungan Stimulus Fiskal

Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) pada dasarnya merupakan instrumen stabilisasi makroekonomi yang mewajibkan penempatan sebagian dana hasil penjualan luar negeri ke dalam sistem keuangan dalam negeri. Data otoritas moneter menunjukkan bahwa penguatan likuiditas valas domestik menjadi prioritas utama guna mengamankan cadangan devisa dan membangun bantalan

(*buffer*) yang kokoh terhadap fluktuasi nilai tukar Rupiah.

Melalui skema yang berlaku efektif per 1 Juni 2026, alur penempatan devisa bagi sektor SDA Non-Migas, termasuk kelapa sawit, mengalami standardisasi baru:

- Sentralisasi Melalui Bank BUMN. Aliran dana hasil ekspor kini wajib 100% disalurkan melalui Rekening Khusus (Reksus) pada Bank Himbara. Eksportir diberikan waktu hingga akhir bulan ketiga setelah dokumen ekspor terbit untuk memastikan dana telah terintegrasi di perbankan Himbara demi kelancaran pelayanan ekspor selanjutnya.
- Tenor Masa Retensi. Komoditas sawit kini mengikuti kewajiban masa penempatan penuh selama 12 bulan di dalam negeri.
- Ruang Manajemen Valas. Selama masa penempatan, eksportir dapat melakukan konversi atau penukaran valas ke mata uang Rupiah paling banyak 50% di bank Himbara yang sama. Sisa dana tetap sepenuhnya menjadi milik korporasi dalam bentuk valas dan dapat diakses kapan saja untuk kebutuhan operasional produktif, seperti penyelesaian kewajiban perpajakan, pembiayaan investasi, pembayaran kepada kreditur, maupun impor bahan baku modal.

Guna menjaga keseimbangan dan daya saing dunia usaha, pemerintah mengimbangi aturan penahanan ini dengan memberikan paket stimulus fiskal yang kompetitif. Salah satunya adalah fasilitas tarif Pajak Penghasilan (PPH) Final berjenjang hingga menyentuh 0% untuk tenor penempatan tertentu, serta dukungan insentif PPH Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk instrumen Surat Berharga Negara (SBN) Valas Domestik.

Seluruh regulasi penempatan ini dirancang dengan prinsip bahwa dana yang mengendap tetap sepenuhnya merupakan

hak milik eksportir. Pemerintah memberikan ruang akses yang luas agar devisa di dalam Reksus tersebut dapat dicairkan sewaktu-waktu guna mendanai kebutuhan operasional yang mendesak dan produktif. Fleksibilitas ini mencakup penyelesaian kewajiban perpajakan, pembiayaan ekspansi investasi, pemenuhan komitmen kepada kreditur, hingga kelancaran impor bahan baku modal.

Melalui bauran kebijakan antara pengetatan retensi dan penyediaan insentif fiskal yang kompetitif, seperti fasilitas PPH Final berjenjang hingga 0% dan PPH Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk SBN Valas Domestik, negara berkomitmen menciptakan titik keseimbangan yang ideal (*equilibrium*). Tujuannya adalah memastikan likuiditas harian dan daya saing dunia usaha di pasar global tetap terjaga secara optimal, sementara di sisi lain, struktur ketahanan finansial makro dan stabilitas moneter nasional memiliki fondasi yang jauh lebih kokoh.

Mengenal PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI)

Sejalan dengan penguatan tata kelola DHE SDA, pemerintah menghadirkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai bagian dari upaya modernisasi tata kelola perdagangan komoditas strategis nasional.

Dalam implementasi awalnya, DSI diarahkan untuk mendukung tata kelola ekspor komoditas strategis nasional, termasuk kelapa sawit dan produk turunannya, melalui sistem yang lebih terintegrasi dan terkoordinasi. DSI dirancang untuk mendukung sinkronisasi data ekspor melalui sistem yang lebih terpadu bersama kementerian dan lembaga terkait.

Dengan pendekatan ini, pelaporan volume perdagangan, nilai ekspor, serta arus transaksi dapat terdokumentasi secara lebih efisien dan transparan. Bagi pelaku usaha, keberadaan sistem yang semakin terintegrasi diharapkan dapat mendukung proses administrasi perdagangan yang lebih efektif, meningkatkan akurasi data, memperkuat kepatuhan perdagangan internasional, serta

meningkatkan kepercayaan pasar global terhadap tata kelola ekspor Indonesia.

Perspektif Dunia Usaha terhadap Implementasi DSI

Sejalan dengan tujuan pemerintah untuk memperkuat tata kelola ekspor dan mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya alam nasional, koalisi dunia usaha lintas sektoral yang diwadahi oleh asosiasi-asosiasi swasta, menyampaikan komitmen serta sejumlah masukan konstruktif terkait implementasi teknis operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Secara umum, kalangan industri mendukung penuh upaya peningkatan transparansi perdagangan, penguatan tata kelola ekspor, dan optimalisasi kontribusi devisa bagi perekonomian nasional demi kemandirian makro. Namun demikian, sebagai mitra dialog strategis pemerintah, pelaku usaha menilai bahwa efektivitas kebijakan di lapangan akan sangat bergantung pada kejelasan penugasan serta detail fungsi operasional DSI dalam ekosistem perdagangan komoditas strategis saat ini.

Oleh karena itu, koalisi lintas sektor ini menekankan pentingnya proses implementasi yang dilakukan secara terencana dan bertahap, didukung sosialisasi yang memadai, serta melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam penyusunan mekanisme teknis. Mengingat karakteristik industri kelapa sawit memiliki struktur rantai pasok, model perdagangan, dan persyaratan pasar global yang sangat spesifik, kesiapan operasional sistem digital dan kelancaran koordinasi lintas lembaga dinilai menjadi faktor penentu agar transformasi ini berjalan selaras dengan keberlanjutan aktivitas usaha serta iklim investasi nasional.

Pelaku usaha juga berpandangan bahwa

penguatan tata kelola ekspor akan semakin efektif apabila didukung sistem digital yang terintegrasi, tata kelola data yang transparan, serta mekanisme koordinasi yang mampu mengakomodasi dinamika pasar global yang terus berkembang. Dengan pendekatan yang kolaboratif, diharapkan tujuan peningkatan transparansi dan efisiensi perdagangan dapat berjalan seiring dengan keberlanjutan aktivitas usaha dan investasi.

Analisis Dampak terhadap Rantai Pasok Kelapa Sawit

Bagi rantai pasok kelapa sawit nasional, penguatan tata kelola DHE SDA dan implementasi DSI berpotensi menciptakan sistem perdagangan yang lebih terdokumentasi, terintegrasi, dan transparan.

Dengan meningkatnya kualitas data ekspor, pelacakan volume perdagangan, serta arus transaksi yang lebih terkoordinasi, berbagai pelaku dalam rantai pasok dapat memperoleh visibilitas yang lebih baik terhadap kondisi pasar. Hal ini mencakup petani, koperasi, pabrik kelapa sawit, industri pengolahan, eksportir, lembaga pembiayaan, hingga regulator.

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi mendukung efisiensi logistik, perencanaan pasokan yang lebih baik, pengurangan asimetri informasi, serta penguatan daya saing ekspor Indonesia di pasar global.

Di sisi lain, dunia usaha juga memerlukan kepastian implementasi dan sosialisasi yang memadai agar penyesuaian terhadap mekanisme baru tidak menimbulkan biaya transaksi tambahan maupun gangguan terhadap kelancaran ekspor. Oleh karena itu, konsistensi regulasi, kesiapan infrastruktur digital, serta koordinasi lintas lembaga akan menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas kebijakan ini di lapangan.

Dampak terhadap Petani

Bagi petani kelapa sawit, manfaat kebijakan ini pada dasarnya akan sangat bergantung pada sejauh mana stabilitas pasar ekspor dapat dipertahankan.

Apabila industri pengolahan dan eksportir tetap memiliki akses pasar yang kuat serta kegiatan ekspor berjalan lancar, maka permintaan terhadap tandan buah segar (TBS) petani berpotensi tetap terjaga. Kondisi ini dapat memberikan manfaat berupa kepastian penyerapan hasil produksi dan stabilitas harga yang lebih baik di tingkat petani.

Namun, apabila kebijakan ekspor satu pintu ini menciptakan munculnya rantai perdagangan yang lebih panjang, sedangkan pabrik kelapa sawit tetap bertahan dengan besaran keuntungan yang selama ini diperoleh, maka tidak menutup kemungkinan banyak pabrik kelapa sawit yang menurunkan harga beli TBS dari petani. Stabilitas arus perdagangan ekspor berpengaruh terhadap aktivitas pembelian tandan buah segar (TBS) oleh industri pengolahan. Oleh karena itu, kepastian regulasi, kelancaran administrasi perdagangan, dan proses transisi yang terencana menjadi aspek penting agar manfaat penguatan tata kelola ekspor dapat dirasakan secara merata hingga ke tingkat petani.

Selain itu, apabila peningkatan likuiditas domestik mampu mendorong investasi pada sektor hilir berbasis sawit, maka peluang penciptaan nilai tambah di dalam negeri juga akan semakin besar. Dalam jangka panjang, hal tersebut dapat membuka peluang peningkatan pendapatan petani melalui keterlibatan yang lebih besar dalam rantai nilai domestik yang semakin terintegrasi.

Sehingga penting untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan dari penguatan tata kelola ekspor tidak hanya terkonsentrasi pada tingkat hilir, tetapi juga dapat dirasakan oleh petani

sebagai pelaku utama di tingkat hulu. Dalam konteks pembangunan pertanian berkelanjutan, keberhasilan kebijakan ini pada akhirnya tidak hanya diukur dari peningkatan devisa atau likuiditas nasional, tetapi juga dari sejauh mana manfaat ekonomi yang tercipta dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan petani, penguatan kelembagaan petani, serta terciptanya rantai nilai yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Mendukung Keberlanjutan Ekosistem Komoditas

Dalam implementasi awal kebijakan ini, kelapa sawit menjadi komoditas pertanian yang paling langsung terkait dengan penguatan tata kelola ekspor melalui DSI.

Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut akan mempengaruhi berbagai pelaku dalam rantai nilai sawit, mulai dari petani, koperasi, pabrik kelapa sawit, industri pengolahan, hingga eksportir. Semakin baik integrasi data perdagangan, administrasi ekspor, dan pengelolaan devisa, semakin kuat pula fondasi bagi pertumbuhan ekosistem sawit yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

Selain mendukung efisiensi perdagangan, tata kelola yang lebih baik juga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menjawab berbagai tuntutan pasar global terkait transparansi, keberlanjutan, dan ketertelusuran rantai pasok.

Dalam jangka panjang, pengalaman implementasi pada sektor kelapa sawit juga dapat menjadi pembelajaran penting bagi pengembangan tata kelola perdagangan dan ekspor komoditas strategis lainnya di Indonesia.

Dengan sinergi antara pemerintah, sektor perbankan, pelaku usaha, industri pengolahan, koperasi, petani, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, transformasi tata kelola ekspor ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan, memperkuat daya saing komoditas Indonesia di pasar global, serta menciptakan manfaat yang lebih luas dan inklusif bagi seluruh pelaku dalam rantai nilai kelapa sawit nasional.

Value Chain Reports.

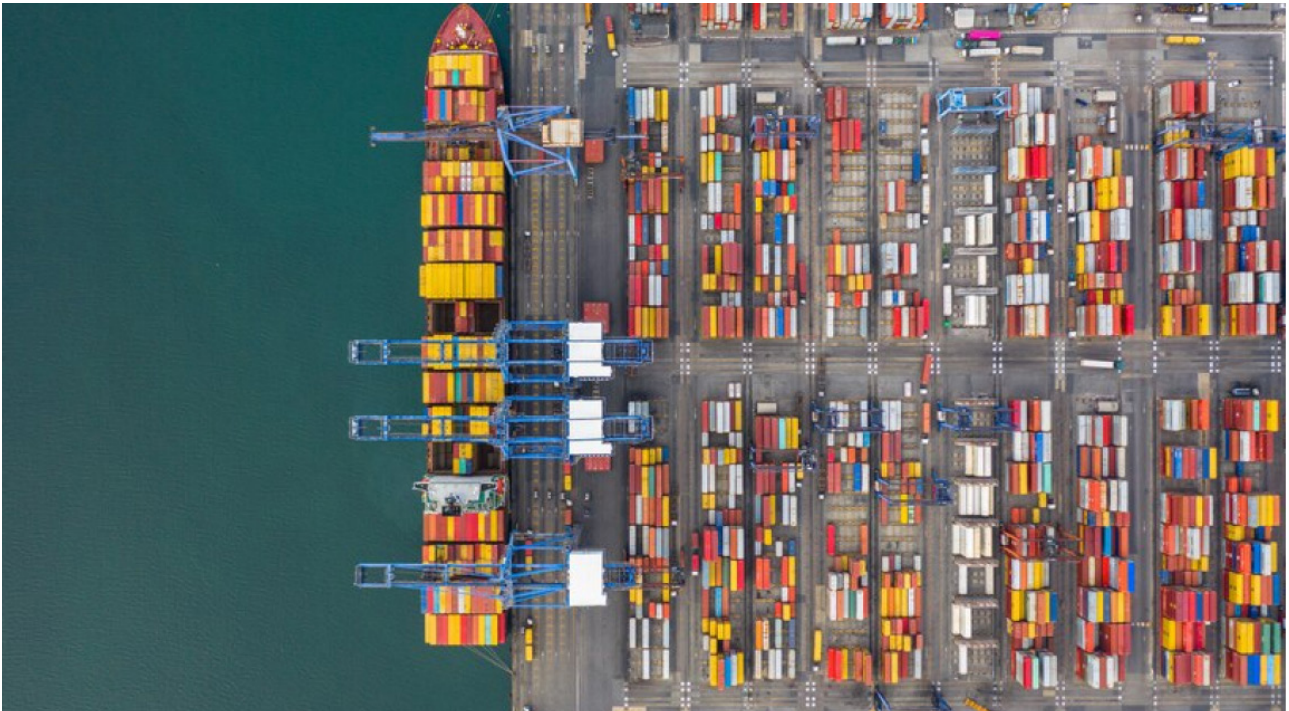
12. *Food and Agriculture Organization (FAO) – Sustainable Agrifood Systems and Value Chain Development Publications.*
13. *World Economic Forum – Supply Chain Resilience and Sustainable Commodity Ecosystem Reports.*

Dikutip dari berbagai sumber referensi:

1. *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).*
2. *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026.*
3. *Bank Indonesia – Kebijakan DHE SDA, stabilitas sistem keuangan, dan pengelolaan devisa.*
4. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia – Kebijakan fiskal dan insentif DHE SDA.*
5. *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia – Kebijakan tata kelola ekspor dan hilirisasi.*
6. *Kementerian Perdagangan Republik Indonesia – Statistik dan tata kelola perdagangan ekspor.*
7. *Kementerian Pertanian Republik Indonesia – Statistik Perkebunan Indonesia.*
8. *Badan Pusat Statistik (BPS) – Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia.*
9. *Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) – Statistik dan Outlook Industri Kelapa Sawit Indonesia.*
10. *World Bank – Trade Facilitation and Global Value Chains Studies.*
11. *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) – Commodity Trade and Agricultural*

Understanding DHE SDA and DSI: Implications for Economic Stability, Supply Chains, and Indonesia's Palm Oil Smallholders

Hendri Surya W. *(This article is written and compiled from various sources)*



Amid an increasingly dynamic global economic landscape, various countries are striving to strengthen their economic resilience through more effective resource management and international trade governance. Indonesia is likewise taking continuous steps to optimize the economic benefits derived from its natural resource exports through enhanced governance of Foreign Exchange Earnings from Natural Resource Exports (*Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam*, or DHE SDA) as mandated by Government Regulation Number 2 of 2026 and Government Regulation Number 21 of 2026, alongside the operation of PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

For the national agricultural sector, specifically the palm oil industry and its derivative products which serve as the primary

anchors for foreign exchange earnings, this new chapter represents a pivotal milestone. This transformation not only redefines the circulation of foreign currency flows but also brings sustainable impacts on supply chain efficiency, downstream investment certainty, and the protection of independent smallholders' welfare upstream.

The New DHE SDA Architecture and Fiscal Stimulus Support

Foreign Exchange Earnings from Natural Resource Exports (DHE SDA) function fundamentally as a macroeconomic stabilization instrument that requires the placement of a portion of revenues generated from foreign sales into the domestic financial

system. Data from monetary authorities indicate that reinforcing domestic foreign exchange liquidity is a critical priority to secure national reserves and build a robust buffer against exchange rate fluctuations of the Rupiah.

Under the framework that takes effect on June 1, 2026, the foreign exchange placement scheme for the non-oil and gas natural resource sector, including palm oil, undergoes a new standardisation:

- **Centralization Through State-Owned Banks:** Export revenue flows must now be 100% channeled through Designated Accounts (*Rekening Khusus*, or *Reksus*) at state-owned banks (*Bank Himbara*). Exporters are granted a period until the end of the third month following the issuance of export documents to ensure funds are integrated within Himbara banks to maintain seamless export services for subsequent periods.
- **Retention Period Tenor:** Palm oil commodities are now subject to a full mandatory placement period of 12 months within the domestic financial system.
- **Foreign Exchange Management Space:** During the placement period, exporters are permitted to convert or exchange their foreign currency earnings into Rupiah up to a maximum limit of 50% at the same Himbara bank. The remaining balance above 50% remains entirely the corporate property of the exporter in foreign currency form and can be accessed at any time to fund productive operational mandates, such as tax liability settlements, new investment financing, creditor payments, or importing capital raw materials

To maintain a healthy operational equilibrium and safeguard the competitiveness of the business community, the government

counterbalances these retention mandates by providing a competitive fiscal stimulus package. This includes progressive tiered Final Income Tax (PPh Final) rates reaching as low as 0% for specific placement tenors, alongside government-borne income tax incentives (PPh DTP) for Domestic Foreign Currency State Securities (*SBN Valas Domestik*) instruments.

All placement regulations are designed under the principle that the retained funds remain the absolute property of the exporter. The government provides extensive access windows so that foreign exchange within the *Reksus* can be utilized at any time to fund urgent and productive operational requirements. This flexibility covers the settlement of tax obligations, investment expansion financing, compliance with creditor commitments, and the seamless import of capital raw materials.

Through this balanced policy mix of tightened retention and competitive fiscal incentives such as tiered PPh Final rates down to 0% and government-borne tax facilities (PPh DTP) for *SBN Valas Domestik*, the state commits to establishing an ideal equilibrium. The objective is to ensure that daily liquidity and the global market competitiveness of the business community are optimally maintained, while simultaneously providing a far more solid foundation for macroeconomic financial structures and national monetary stability.

Understanding PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI)

In tandem with the reinforcement of DHE SDA governance, the government has introduced PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) as part of broader efforts to modernize the trade governance of national strategic commodities.

In its initial implementation phase, DSI is directed to support the export governance of national strategic commodities, including

palm oil and its derivative products, through a more integrated and coordinated system. DSI is designed to support the synchronization of export data through a more unified single-window platform in collaboration with relevant ministries and state institutions.

Through this approach, trade volume reporting, export values, and transaction flows can be documented more efficiently and transparently. For businesses, the presence of an increasingly integrated system is expected to facilitate more effective trade administration processes, improve data accuracy, reinforce compliance within international trade, and elevate global market confidence in Indonesia's export governance framework.

Business Community Perspectives on DSI Implementation

In alignment with the government's objective to strengthen export governance and optimize the economic benefits of national natural resources, a cross-sectoral business coalition spearheaded by private sector associations, has expressed its commitment and provided a series of constructive inputs regarding the technical operational implementation of PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

In general, industrial sectors fully support the enhancement of trade transparency, the reinforcement of export governance, and the optimization of foreign exchange contributions to the national economy for macroeconomic independence. Nonetheless, as strategic dialogue partners to the government, business actors emphasize that the policy's field effectiveness will heavily depend on clear organizational mandates and the granular detail of DSI's operational functions within the current strategic commodity trade ecosystem.

Consequently, this cross-sectoral coalition underscores the importance of a well-planned and phased implementation process, backed by adequate socialization and meaningful consultation with relevant stakeholders during the formulation of technical mechanisms. Given that the palm oil industry possesses highly specific supply chain structures, commercial models, and global market requirements, the operational readiness of digital systems and seamless cross-institutional coordination are deemed decisive factors in ensuring that this transformation aligns with business continuity and the national investment climate.

Furthermore, industry participants believe that export governance will be far more effective if supported by a well-integrated digital platform, transparent data governance, and coordination mechanisms capable of accommodating ever-evolving global market dynamics. Through this collaborative approach, it is envisioned that trade transparency and efficiency goals can advance hand-in-hand with commercial and investment sustainability.

Impact Analysis on the Palm Oil Supply Chain

For the national palm oil supply chain, strengthening DHE SDA governance and implementing DSI have the potential to foster an export trading system that is more thoroughly documented, integrated, and transparent.

With enhanced export data quality, streamlined tracking of trade volumes, and more coordinated transaction flows, various actors across the supply chain can obtain better visibility into market conditions. This encompasses smallholders, cooperatives, palm oil mills, downstream processing industries, exporters, financial institutions, and regulators.

In the long term, these conditions could support logistical efficiency, enhanced supply planning, minimized information asymmetry,

and reinforced export competitiveness for Indonesia in global markets.

On the other hand, in line with the business community's feedback regarding the importance of a smooth transition, the certainty of rapid administrative processing becomes vital to ensure that compliance with new mechanisms does not trigger administrative bottlenecks or unnecessary transaction costs. Therefore, regulatory consistency across state institutions and the reliability of a unified digital infrastructure will serve as essential factors in maintaining the fluid rhythm of daily industrial operations.

Impact on Smallholder Farmers

For palm oil smallholders, the benefits of this policy will essentially depend on the extent to which export market stability can be maintained.

If the processing industry and exporters maintain strong market access and export activities run smoothly, the demand for smallholders' Fresh Fruit Bunches (FFB) could potentially remain stable. This condition can provide benefits in the form of guaranteed crop absorption and better price stability at the smallholder level.

However, if this single-gate export policy leads to longer trade chains while palm oil mills hold on to their historic profit margins, it is not impossible that many palm oil mills might lower their purchase prices for smallholder FFB. The stability of export trade flows directly influences the purchasing activities of fresh fruit bunches by the processing industry. Therefore, regulatory certainty, smooth trade administration, and a well-planned transition process are vital aspects so that the benefits of strengthened export governance can be felt equitably down to the smallholder level.

Furthermore, if the increase in domestic liquidity successfully drives investment

into palm oil-based downstream sectors, the opportunities for domestic value-add creation will expand. In the long run, this could unlock opportunities for increasing smallholder income through greater involvement in an increasingly integrated domestic value chain.

Thus, it is crucial to ensure that the economic benefits generated from strengthened export governance are not concentrated merely at the downstream level, but can also be felt by smallholders as the primary actors at the upstream level. In the context of sustainable agricultural development, the success of this policy will ultimately be measured not only by an increase in national foreign exchange or liquidity but also by how far the economic benefits created can be translated into improved smallholder welfare, strengthened farmer institutions, and the creation of a more inclusive and equitable value chain.

Supporting Sustainable Commodity Ecosystems

In the initial implementation of this policy, palm oil stands as the agricultural commodity most directly tied to the strengthening of export governance through DSI.

The successful implementation of this policy will affect various actors within the palm oil value chain, from smallholders, cooperatives, palm oil mills, and processing industries, to exporters. The better the integration of trade data, export administration, and foreign exchange management, the stronger the foundation for the growth of a sustainable, inclusive, and highly competitive palm oil ecosystem.

Beyond supporting trade efficiency, enhanced governance can also strengthen Indonesia's positioning in addressing various global market demands regarding transparency, sustainability, and supply chain traceability.

In the long run, the implementation experience within the palm oil sector can serve as vital blueprint lessons for developing trade and export governance for other strategic

commodities in Indonesia.

With synergy among the government, the banking sector, business players, the processing industry, cooperatives, smallholders, and various other stakeholders, this export governance transformation is expected to support sustainable economic growth, bolster the competitiveness of Indonesian commodities in the global market, and create broader, more inclusive benefits for all actors within the national palm oil value chain.

Cited from Various Reference Sources:

1. *Government Regulation (PP) No. 2 of 2026 on DHE SDA.*
2. *Government Regulation (PP) No. 21 of 2026.*
3. *Bank Indonesia – Regulations and policy briefs on Foreign Exchange Earnings from Natural Resource Exports (DHE SDA), foreign exchange reserves, and financial system stability.*
4. *Ministry of Finance of the Republic of Indonesia – Policies and fiscal incentives related to DHE SDA placement and export financing.*
5. *Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia – Policy communications on export governance, downstream industrialization, and national economic resilience.*
6. *Ministry of Trade of the Republic of Indonesia – Export statistics, commodity trade governance, and export administration policies.*
7. *Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia – Plantation Statistics and reports on Indonesia’s palm oil sector.*
8. *Statistics Indonesia (BPS) – Foreign Trade Statistics, Export Performance Statistics, and Indonesia Economic Indicators.*
9. *Indonesia Palm Oil Association (GAPKI) – Palm oil export performance reports and industry outlook publications.*
10. *World Bank – Trade Facilitation, Global Value Chains, and Commodity Export Development studies.*
11. *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) – Global Trade, Commodity Markets, and Agricultural Value Chain reports.*
12. *Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) – Sustainable Agricultural Value Chains and Agrifood Systems Transformation publications.*
13. *World Economic Forum – Supply Chain Resilience, Trade Competitiveness, and Sustainable Commodity Ecosystem reports*

Panen Raya Jagung Serentak, Triputra Agro Persada Turut Memperkuat Ketahanan Pangan

PISAgro, Triputra Agro Persada



PT Triputra Agro Persada Tbk (TAP) bersinergi bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Upaya itu dilakukan TAP antara lain dengan membina para petani mengembangkan lahan produktif untuk penanaman jagung hingga panen di Jambi.

Melalui TAP untuk Negeri, perusahaan itu meyakini kolaborasi lintas sektor jadi langkah penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat lewat pembukaan peluang ekonomi baru di daerah.

Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional butuh kolaborasi lintas sektor agar manfaatnya dapat dirasakan berkelanjutan oleh masyarakat. Tidak hanya pemerintah, keterlibatan dunia usaha, aparat, dan

petani jadi bagian penting dalam menjaga produktivitas pangan sekaligus membuka peluang ekonomi baru di daerah.

Semangat kolaborasi itu terlihat dalam Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II-2026 yang digelar Polda Jambi bersama PT Brahma Bina Bakti (BBB), member of TAP, di Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, baru-baru ini. Panen raya tersebut menjadi simbol kuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, sektor swasta dan kelompok tani, dalam mendukung penguatan ketahanan pangan nasional.

Penanaman Jagung

Di Provinsi Jambi sendiri, hingga Mei 2026, penanaman jagung binaan Polda Jambi telah

mencapai lebih dari 569 hektare (ha) dengan target pengembangan hingga 2.370 ha sepanjang tahun ini. Sementara itu, hasil panen jagung yang telah terserap mencapai lebih dari 381 ton melalui Bulog.

Sementara itu, melalui inisiatif TAP untuk Negeri, TAP memandang ketahanan pangan sebagai bagian dari komitmen pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya mendukung agenda nasional, tetapi juga membuka manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan.

Dukungan terhadap program ketahanan pangan dilakukan perusahaan secara berkelanjutan di berbagai wilayah operasional di Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur melalui pengembangan lahan produktif bersama masyarakat sekitar. Program itu dijalankan kolaboratif dengan melibatkan kelompok tani dan masyarakat desa sebagai penggarap maupun mitra pengelola lahan.

Rangkaian kegiatan diawali pemberian simbolis Kredit Usaha Rakyat (KUR), penyerahan bantuan sosial kepada kelompok tani binaan TAP untuk Negeri, panen raya jagung bersama, kegiatan pipil jagung, hingga pelepasan hasil panen 2 ton seluruhnya diserap Bulog.

Melalui langkah kolaboratif yang dilakukan berkelanjutan, TAP untuk Negeri diharapkan sinergi antara dunia usaha dan para pemangku kepentingan dapat terus diperkuat untuk mendukung terciptanya ketahanan pangan yang berkelanjutan, meningkatkan produktivitas pertanian, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di daerah.

Peluang Usaha Baru

Dalam sambutannya, Wakapolda Jambi Brigjen Pol B Ali menyampaikan, Polda Jambi terus berupaya mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pengembangan lahan pertanian

jagung di wilayah hukum Polda Jambi.

Memasuki kuartal II-2026 hingga Mei ini, binaan petani Polda Jambi telah melakukan penanaman jagung 569,13 ha dengan target 2026 mencapai 2.370 ha. “Untuk penyerapan hasil panen, hingga Mei 2026, Bulog telah menyerap 381,32 ton dari target 6.200 ton,” jelas Ali dalam keterangan yang dikutip Kamis (21/05/2026).

Di hari sama, Polda Jambi juga melaksanakan panen raya serentak di tujuh titik wilayah hukum Polda Jambi dengan total luas lahan 14,3 ha. Kegiatan yang dipusatkan di lahan BBB tersebut diperkirakan menghasilkan total panen sekitar 35 ton dan seluruh hasil panen diserap Bulog.

Bagi masyarakat sekitar, program ini tidak hanya menghadirkan aktivitas pertanian produktif, tetapi juga memberikan tambahan pendapatan dan membuka peluang usaha baru di desa. Lahan yang sebelumnya belum dimanfaatkan optimal kini mulai berkembang menjadi area produktif yang memberi nilai ekonomi bagi masyarakat.

Kegiatan panen jagung yang digelar Polda Jambi itu bagian dari agenda nasional Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II-2026 serentak di berbagai daerah di Indonesia dan terhubung virtual bersama Presiden Prabowo Subianto serta Kapolri Listyo Sigit Prabowo dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Dalam rangkaian itu juga dilakukan *Groundbreaking* 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri serta Launching Operasional 166 SPPG. Agenda di Provinsi Jambi itu turut dihadiri Wakapolda Jambi Brigjen Pol B Ali, Wakil Gubernur Jambi H Abdullah Sani, unsur Forkopimda, pejabat utama Polda Jambi, Kapolres Muaro Jambi AKBP Heri Supriawan, perwakilan Bulog, pihak perbankan, pemerintah daerah, serta kelompok tani

Sumber: Investor Daily

Simultaneous Corn Harvest, Triputra Agro Persada Strengthens National Food Security

PISAgro, Triputra Agro Persada



PT Triputra Agro Persada Tbk (TAP) has joined forces with the Indonesian National Police (Polri) in strengthening national food security. One of TAP's contributions has been mentoring farmers in developing productive land for corn cultivation and harvesting in Jambi. Through its *TAP untuk Negeri* (TAP for the Nation) initiative, it believes that cross-sector collaboration is an essential step in improving community welfare by creating new economic opportunities in rural areas.

Efforts to strengthen national food security require collaboration among multiple stakeholders to ensure that the benefits can be sustainably enjoyed by communities. Beyond government involvement, the participation of businesses, law enforcement agencies, and farmers plays a critical role in maintaining food productivity while creating

new economic opportunities in local regions.

This spirit of collaboration was demonstrated during the Second Quarter 2026 Simultaneous Corn Harvest, organized by the Jambi Regional Police (Polda Jambi) in partnership with PT Brahma Bina Bakti (BBB), a member of TAP, in Suko Awin Jaya Village, Sekernan District, Muaro Jambi Regency, Jambi, recently. The harvest event served as a strong symbol of synergy among the National Police, local government, private sector, and farmer groups in supporting Indonesia's national food security agenda.

Corn Cultivation Expansion

In Jambi Province, as of May 2026, corn cultivation under the guidance of Polda Jambi

had reached more than 569 hectares, with a development target of 2,370 hectares throughout the year. Meanwhile, more than 381 tons of harvested corn had been absorbed by the state logistics agency, Bulog.

Through the TAP untuk Negeri initiative, TAP views food security as part of its commitment to sustainable development, not only in supporting the national agenda but also in creating tangible economic benefits for communities surrounding its operational areas.

The company's support for food security programs has been implemented continuously across its operational regions in Jambi, Central Kalimantan, and East Kalimantan through the development of productive farmland in collaboration with local communities. The program is carried out through partnerships involving farmer groups and village communities as cultivators and land management partners.

The series of activities began with the symbolic distribution of People's Business Credit (KUR) financing, the provision of social assistance to farmer groups supported by TAP untuk Negeri, a joint corn harvest, corn shelling activities, and the release of two tons of harvested corn, all of which were absorbed by Bulog.

Through these sustained collaborative efforts, TAP untuk Negeri hopes to further strengthen synergy between the private sector and stakeholders in supporting sustainable food security, increasing agricultural productivity, and creating economic opportunities for local communities.

Creating New Economic Opportunities

In his remarks, Brigadier General B. Ali, Deputy Chief of the Jambi Regional Police, stated that Polda Jambi continues to support the national food security

program through the development of corn cultivation areas within its jurisdiction. As of May 2026, farmer groups under the guidance of Polda Jambi had planted corn on 569.13 hectares, with a target of reaching 2,370 hectares by the end of 2026. "Regarding harvest absorption, as of May 2026, Bulog has absorbed 381.32 tons out of the targeted 6,200 tons," Ali explained in a statement quoted on Thursday (May 21, 2026).

On the same day, Polda Jambi also conducted simultaneous harvest activities at seven locations across its jurisdiction, covering a total land area of 14.3 hectares. The event, centered on BBB's farmland, was expected to generate approximately 35 tons of corn, all of which would be purchased by Bulog. For local communities, the program has not only introduced productive agricultural activities but has also provided additional income and opened up new business opportunities in rural areas. Land that was previously underutilized is now being transformed into productive farmland that generates economic value for local residents.

The corn harvest event organized by Polda Jambi was part of the nationwide Second Quarter 2026 Simultaneous Corn Harvest Program, held simultaneously across various regions of Indonesia and connected virtually with President Prabowo Subianto and National Police Chief General Listyo Sigit Prabowo, who participated from Tuban Regency, East Java. The event also included the groundbreaking ceremony for 10 National Police Food Security Warehouses and the launch of operations for 166 Nutrition Fulfillment Service Units (SPPG).

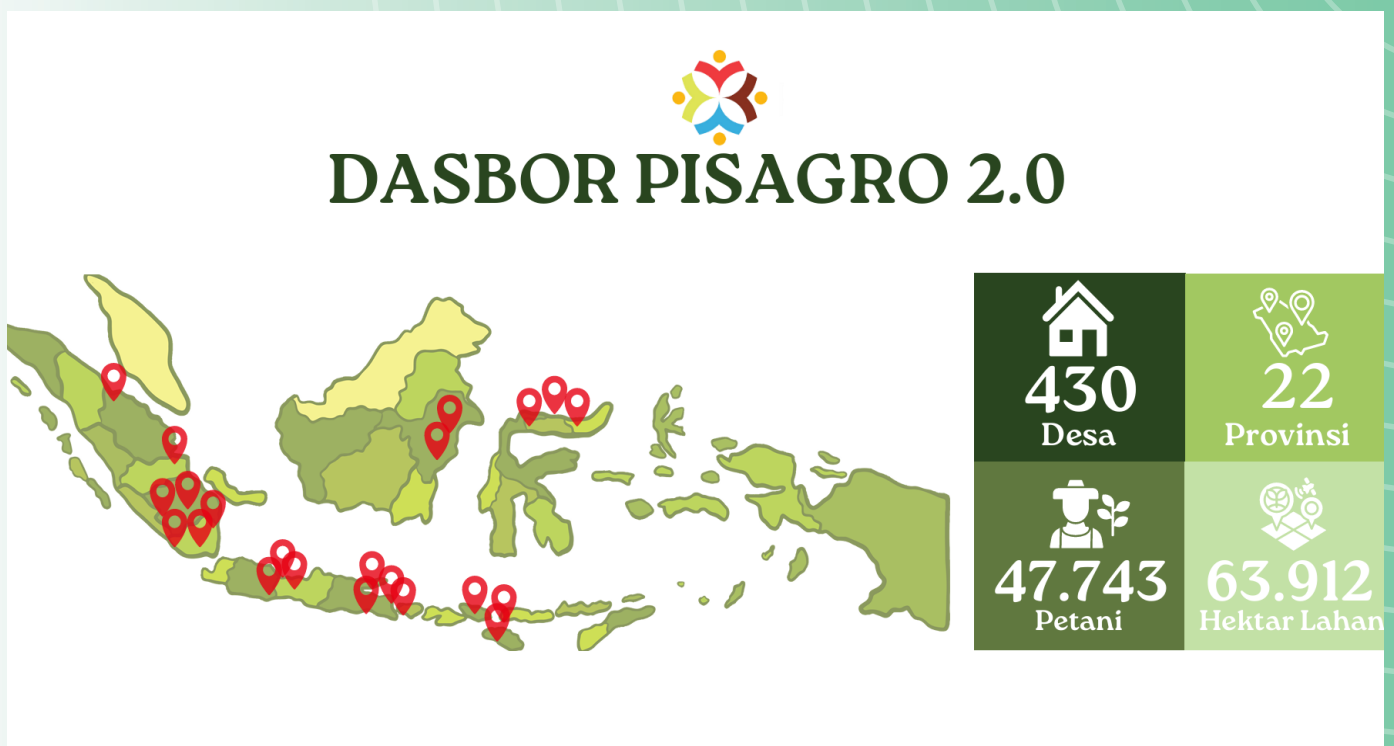
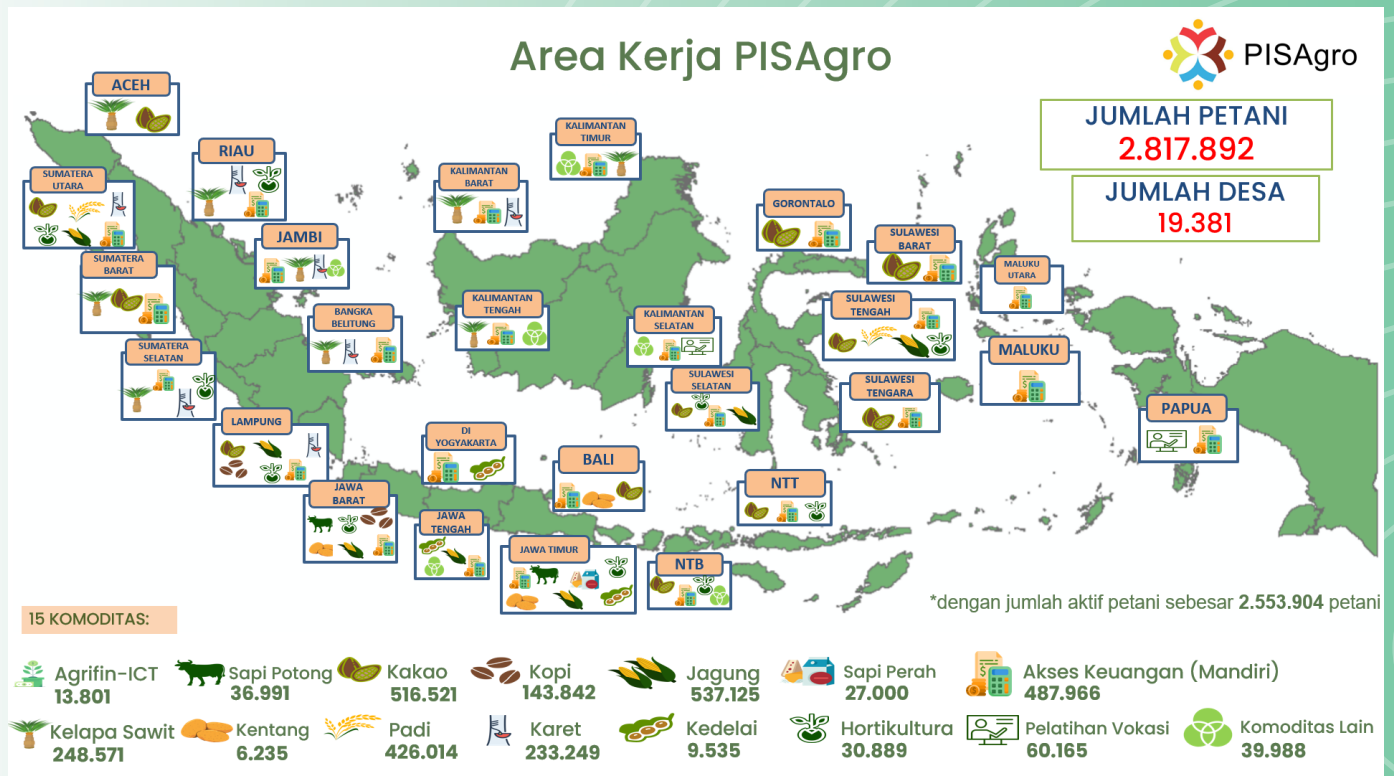
The activities in Jambi Province were attended by Deputy Chief of Polda Jambi Brigadier General B. Ali, Vice Governor of Jambi Abdullah Sani, members of the Regional Leadership Coordination Forum (Forkopimda), senior officials of Polda Jambi, Muaro Jambi Police Chief AKBP Heri Supriawan, representatives from Bulog, banking institutions, local government agencies, and farmer groups.

Source: Investor Daily

Sorotan

Capaian Dasbor PISAgro 2.0 Saat Ini - Mei 2026

William Widjaja



TINJAUAN

PERTUMBUHAN

47% Petani memiliki akses ke **Bantuan Finansial**

97% Dari total hasil panen petani **dibeli langsung** oleh perusahaan

46% Petani berpartisipasi dalam **Lembaga Koperasi**



www.pisagro.org

KETAHANAN

40% Petani telah menerapkan **Adaptasi Iklim**



setidaknya **2** Fasilitas Kesehatan yang beroperasi dan **didukung** Perusahaan di desa

35% Petani menerapkan praktik **mitigasi bencana**



contact@pisagro.org

KEBERLANJUTAN

82% Dari keseluruhan lahan telah bermitra untuk menerapkan **manajemen lahan berkelanjutan**

100% ha lahan dipupuk dengan penerapan **Praktik Pertanian yang Baik**

789

Aktivitas (Sosialisasi, Kampanye, Pelatihan) **diadakan Perusahaan untuk mendukung** petani menerapkan manajemen limbah.



PISAgro

PERTUMBUHAN

47% Petani memiliki akses ke **Bantuan Finansial**

97% Dari total hasil panen petani **dibeli langsung** oleh perusahaan

46% Petani berpartisipasi dalam **Lembaga Koperasi**



www.pisagro.org

48% Petani menerapkan **Praktik Pertanian yang Baik (GAP)**

Pendapatan rata-rata petani per bulan:



Rp 4,2 Juta



Rp 5 Juta



Rp 9 juta



contact@pisagro.org



PISAgro

KETAHANAN

40%

Petani telah menerapkan
Adaptasi Iklim

35%

Petani menerapkan praktik
mitigasi bencana



at least
2

Fasilitas Kesehatan yang
beroperasi dan **didukung**
Perusahaan di desa

Upaya dorongan tentang kesehatan
secara total dilakukan oleh
perusahaan-perusahaan,



366

**1-2 kali setahun*

Kegiatan meliputi Sosialisasi,
Kampanye, Pelatihan, dan Program
Langsung



www.pisagro.org



contact@pisagro.org



PISAgro

KEBERLANJUTAN

82%

Dari keseluruhan lahan telah bermitra
untuk menerapkan **manajemen**
lahan berkelanjutan

Aktivitas (Sosialisasi, Kampanye, Pelatihan) **diadakan**
Perusahaan untuk mendukung petani menerapkan
manajemen limbah.



418

Aktivitas

Upaya Pengelolaan Limbah yang Diadakan oleh
Perusahaan:



287

Sosialisasi



266

Kampanye



236

Pelatihan

100%



ha lahan telah dipupuk dengan penerapan
Praktik Pertanian yang Baik



www.pisagro.org



contact@pisagro.org

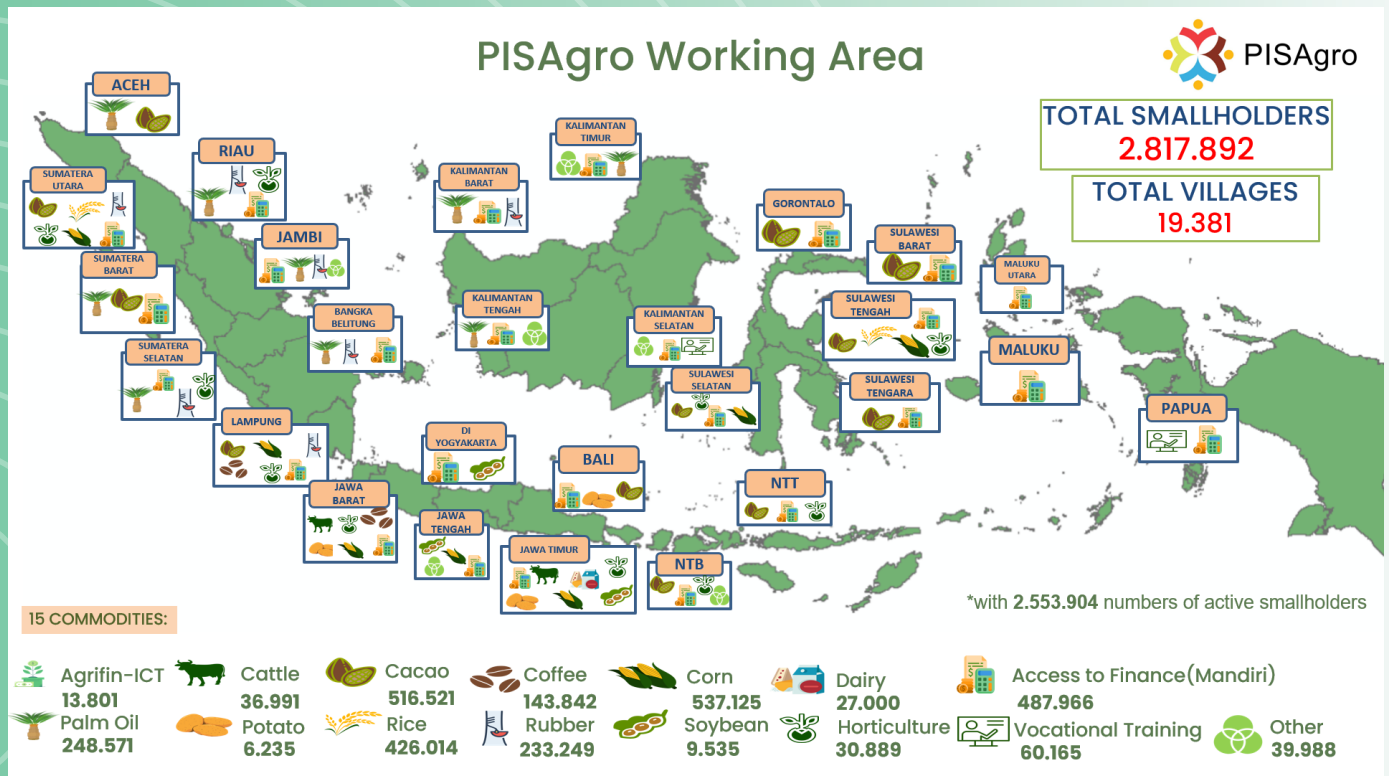


PISAgro

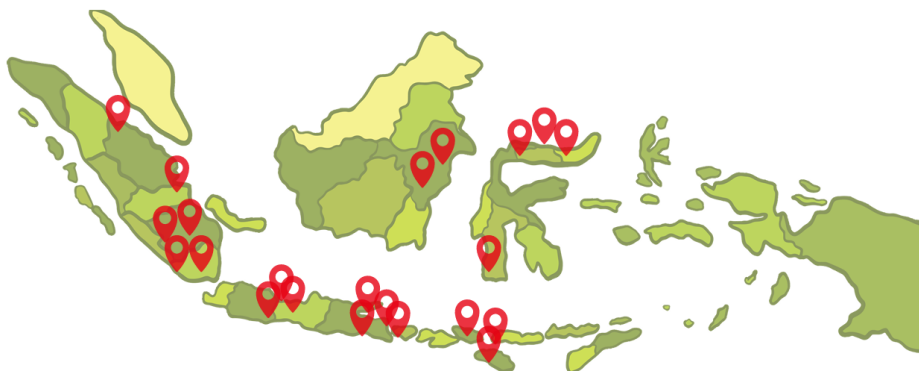
Highlights

Achievement of PISAgro 2.0 Dashboard - May 2026

William Widjaja



PISAGRO DASHBOARD 2.0



 430 Villages	 22 Province
 47.743 Smallholders	 63.912 Ha of Land

OVERVIEW

GROWTH

47% Smallholders have access to **Finance**

97% of Smallholders harvest sold to **partnered companies**

46% Smallholders participated in **Cooperatives**



www.pisagro.org

RESILIENCE

40% Smallholders implemented **Adaptation** already **Climate**



at least 2 Health facilities operated in each village **supported by company**

35% of smallholders are implemented act of **prevention on calamity**



contact@pisagro.org

SUSTAINABILITY

82% of total land are under partnership implementation of **land sustainable management**

100% ha of land fertilized under implementation of **Good Agriculture Practice**

789

Activites (Socialization, Campaign, Training) **conducted by company to support** smallholders implement management waste.



PISAgro

GROWTH

47% Smallholders have access to **Finance**

97% of Smallholders harvest sold to **partnered companies**

46% Smallholders participated in **Cooperatives**



www.pisagro.org



contact@pisagro.org

48% of Smallholders implemented **Good Agricultural Practice (GAP)**

Smallholders average income per month:



4.2 Million IDR



5 Million IDR



9 Million IDR



PISAgro

RESILIENCE

40%

Smallholders already implemented **Climate Adaptation**

35%

of smallholders are implemented act of **prevention on calamity**



at least **2**

Health facilities operated in each village **supported by company**

Encouragement efforts about health in total were conducted by the companies,



366

**1-2 times a year*

Activities including Socialization, Campaign, Training, and Direct Program



www.pisagro.org



contact@pisagro.org



PISAgro

SUSTAINABILITY

82%

of total land are under partnership implementation of **land sustainable management**

Activites (Socialization, Campaign, and Training) **conducted by company to support** smallholders in Land Management,



418

Activities

Waste Management Effort Conducted by Company:



287

Socialization



266

Campaign



236

Training

100%



Ha of land fertilized by implementing **Good Agricultural Practice**



www.pisagro.org



contact@pisagro.org



PISAgro

Sorotan

1. FGD “Kedaulatan Pangan Sebagai Fokus: Mengembangkan Kapasitas Protein Indonesia”

Penguatan kapasitas protein nasional menjadi salah satu isu strategis dalam mendukung kedaulatan pangan Indonesia di tengah meningkatnya tantangan ketahanan pangan global, ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasok, dan kebutuhan untuk memastikan ketersediaan pangan bergizi yang terjangkau dan berkelanjutan.

Di kesempatan ini, PISAgro berpartisipasi dalam *Focus Group Discussion* (FGD) bertajuk “Kedaulatan Pangan Sebagai Fokus: Mengembangkan Kapasitas Protein Indonesia” yang diselenggarakan oleh Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) pada 5 Mei 2026 di Jakarta, yang dimana Direktur Eksekutif PISAgro, Insan Syafaat, berpartisipasi sebagai panelis pada FGD ini. Kegiatan ini mempertemukan perwakilan pemerintah, legislatif, industri, asosiasi, akademisi, dan pakar untuk mendiskusikan tantangan serta peluang strategis dalam penguatan ekosistem protein nasional di tengah dinamika geopolitik global dan meningkatnya tantangan ketahanan pangan.

FGD diselenggarakan sebagai bagian dari upaya Prasasti untuk menggalakan perspektif para pemangku kepentingan mengenai kondisi industri protein Indonesia, sekaligus memperkaya kajian dan pengembangan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung peningkatan kapasitas produksi protein domestik secara berkelanjutan.

Dalam sesi pembuka, tim Prasasti memaparkan perkembangan lanskap protein nasional dan global, termasuk dampak ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasok, serta meningkatnya urgensi penguatan kapasitas produksi dalam negeri untuk menjamin ketersediaan protein yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

Diskusi kemudian berfokus pada berbagai tantangan struktural yang masih dihadapi ekosistem protein nasional, antara lain kesenjangan antara permintaan dan kapasitas produksi domestik, fluktuasi harga, keterbatasan infrastruktur rantai dingin dan distribusi, inkonsistensi kualitas produk, serta rendahnya akses pasar bagi produsen skala kecil. Para peserta juga membahas pentingnya peningkatan produktivitas melalui pemanfaatan teknologi, penguatan praktik budidaya dan manajemen usaha, serta pengembangan sistem pendukung yang lebih terintegrasi.

Dalam diskusi tersebut, PISAgro menyampaikan perspektif mengenai pentingnya kolaborasi multipihak dalam memperkuat rantai pasok pangan dan protein nasional. Beliau menekankan bahwa peningkatan kapasitas produksi tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan sektoral, melainkan memerlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, petani, peternak, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga pembangunan untuk mendorong produktivitas, keberlanjutan, dan inklusivitas sistem pangan Indonesia.

Diskusi juga menyoroti pentingnya membangun ekosistem protein yang tangguh melalui penguatan kapasitas petani dan peternak, peningkatan akses terhadap teknologi dan pembiayaan, pengembangan infrastruktur pendukung, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi investasi dan inovasi. Selain itu, para peserta menekankan perlunya kebijakan yang mampu menjawab tantangan global sekaligus memperkuat daya saing industri protein nasional.

Melalui FGD ini, para pemangku kepentingan berhasil mengidentifikasi berbagai peluang dan rekomendasi awal untuk mendukung pengembangan kapasitas protein Indonesia. Hasil diskusi akan menjadi masukan penting bagi penyusunan riset lanjutan, risalah kebijakan, dan advokasi kebijakan yang bertujuan memperkuat

kedaulatan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem protein yang lebih produktif, berkelanjutan, dan resilien.

Kegiatan ini mencerminkan pentingnya dialog multipihak dalam merumuskan solusi terhadap tantangan ketahanan pangan nasional, sekaligus memperkuat komitmen bersama untuk membangun sistem pangan Indonesia yang mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan menghadapi berbagai tekanan global di masa depan.

2. FGD Studi Kesiapan Implementasi Menuju Kakao Berkelanjutan Indonesia



Sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* / SDGs) serta mendukung upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dan pelestarian lingkungan, pengembangan perkebunan kakao berkelanjutan menjadi langkah penting dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut. Untuk itu, diperlukan pedoman yang komprehensif dan terstandarisasi guna menyatukan prinsip dan kriteria ke dalam satu Pedoman Nasional yang diakui secara global, sehingga dapat mengurangi beban ekonomi petani dan menyederhanakan proses implementasi standar keberlanjutan.

Pada 6 Januari 2026, Direktorat Jenderal Perkebunan menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan Perkebunan Kakao Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Cocoa/ISCocoa*) melalui Keputusan Nomor 19/KB.410/01/2026. Pedoman ini dirancang untuk memberikan arahan bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku usaha, petani, koperasi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), dalam menerapkan praktik berkelanjutan di seluruh rantai nilai kakao.

Dalam rangka persiapan implementasi ISCocoa dan penyamaan persepsi antar pemangku kepentingan mengenai penyelenggaraan perkebunan kakao berkelanjutan, Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) Studi Kesiapan Implementasi Menuju Kakao Berkelanjutan Indonesia pada 13 Mei 2026 di Bogor. Kegiatan ini bertujuan menghimpun masukan dan rekomendasi terhadap rencana implementasi ISCocoa sebagai acuan nasional bagi pengembangan kakao berkelanjutan di Indonesia. PISAgro turut berpartisipasi dalam kegiatan ini melalui kehadiran Ferial Lubis dan Hendri Surya, bersama perwakilan pemerintah, pelaku usaha, lembaga pembangunan, dan organisasi terkait lainnya.

Pedoman Kakao Berkelanjutan Indonesia memperhatikan tiga aspek utama, yaitu:

1. Aspek Lingkungan: Melindungi ekosistem dan menjaga kesehatan tanah.
2. Aspek Ekonomi: Meningkatkan daya saing dan kesejahteraan pelaku usaha serta petani.
3. Aspek Sosial: Memastikan pemenuhan hak-hak pekerja dan keselamatan kerja.

Selain itu, pedoman ini juga mendukung peningkatan produktivitas, kualitas produk, dan daya saing kakao Indonesia di pasar global.

Dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan pedoman tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan telah melakukan dialog dengan

berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, ISCocoa dinilai memiliki keselarasan dengan berbagai standar internasional, seperti ISO 34101, *Rainforest Alliance* (RA), dan Fairtrade (FT).

Untuk mengetahui sejauh mana pedoman tersebut dapat diterapkan di tingkat petani, tim Direktorat Jenderal Perkebunan akan melaksanakan uji lapangan pada Mei–Juli 2026 melalui wawancara dengan petani kakao di beberapa provinsi, yaitu Sulawesi Tengah, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Sulawesi Selatan.

Enam dimensi yang akan dievaluasi dalam uji lapangan tersebut meliputi:

1. Legalitas Lahan: Sertifikat tanah, Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), dan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).
2. *Good Agricultural Practices* (GAP): Penggunaan benih berlabel, pemangkasan, irigasi, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT).
3. Konservasi Alam: Penerapan terasering, kawasan penyangga (*buffer zone*), serta pengelolaan limbah dan emisi.
4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Hak Pekerja: Penggunaan alat pelindung diri (APD), kesetaraan hak, larangan pekerja anak, dan penerapan upah sesuai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
5. Tanggung Jawab Sosial: Kesejahteraan dan pengembangan masyarakat sekitar.
6. Manajemen Bisnis: Transparansi harga, prosedur operasional standar (SOP) ketertelusuran, dan penerapan prinsip anti-penyuapan.

Selain aspek teknis dan sosial, studi ini juga akan mengukur dampak beban finansial sertifikasi terhadap pekebun kakao skala kecil, melalui dua indikator utama:

1. Kesiediaan Membayar: Jika sertifikasi diwajibkan, apakah pekebun bersedia menanggung biaya sertifikasi (bersedia dengan syarat atau tidak bersedia).

2. Kemampuan Membayar: Jika biaya sertifikasi ditanggung sendiri oleh pekebun, apakah secara finansial mereka mampu atau tidak mampu membayarnya.

Hasil survei lapangan dijadwalkan akan dipresentasikan dan dibahas lebih lanjut dalam sebuah workshop yang akan diselenggarakan pada Agustus 2026.

3. Sosialisasi Nasional & Diseminasi Platform Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan



Penguatan tata kelola komoditas berkelanjutan menjadi semakin penting di tengah meningkatnya tuntutan global terhadap transparansi rantai pasok, ketertelusuran produk, dan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan. Melalui pendekatan yurisdiksi, Indonesia berupaya memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor swasta, petani, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan pembangunan komoditas yang tidak hanya produktif dan berdaya saing, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Kementerian

PPN/Bappenas menyelenggarakan Sosialisasi Nasional dan Diseminasi Platform Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB) sebagai forum multipihak untuk memperkuat implementasi tata kelola komoditas berkelanjutan di Indonesia.

Kegiatan ini mempertemukan perwakilan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga penelitian, mitra pembangunan, serta organisasi masyarakat sipil untuk membahas peran Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB) dalam mendukung tata kelola komoditas yang lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Forum ini juga menjadi momentum penting untuk memperkenalkan dan memperkuat posisi IYB sebagai instrumen nasional yang dapat mendukung integrasi data lintas sektor, pengambilan keputusan berbasis bukti, serta peningkatan daya saing komoditas Indonesia di pasar global.

PISAgro turut berpartisipasi dalam kegiatan ini sebagai bagian dari komitmen untuk mendorong transformasi sistem pertanian dan rantai pasok yang lebih berkelanjutan. Direktur Eksekutif PISAgro, Bapak Insan Syafaat, hadir sebagai panelis pada sesi talkshow bertajuk “Penguatan Tata Kelola Keberlanjutan Yurisdiksi melalui IYB: Penyelarasan Kebijakan, Sistem, dan Kelembagaan untuk Tata Kelola Komoditas Berkelanjutan” bersama perwakilan Kementerian Dalam Negeri, CIFOR-ICRAF, dan pemerintah daerah.

Diskusi menyoroti pentingnya penguatan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan petani dalam mendukung implementasi standar keberlanjutan, peningkatan ketertelusuran rantai pasok, serta pengembangan sistem data yang terintegrasi. Para panelis juga membahas tantangan yang masih dihadapi dalam implementasi keberlanjutan di tingkat lapangan, termasuk harmonisasi kebijakan lintas sektor, interoperabilitas data, penguatan kapasitas pemerintah

daerah, serta pentingnya memastikan pekebun kecil dapat menjadi bagian dari rantai pasok yang memenuhi standar pasar global.

Dalam sesi diskusi, turut dibahas peluang peningkatan skala implementasi IYB melalui kolaborasi multipihak, penguatan investasi berkelanjutan, komitmen pasar, serta pengembangan sistem monitoring dan pelaporan yang kredibel. Pendekatan yurisdiksi dinilai memiliki potensi untuk memperkuat koordinasi antaraktor, meningkatkan efektivitas program pembangunan komoditas, serta mendukung pencapaian target nasional terkait pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan, dan pengurangan emisi.

Melalui forum ini, para pemangku kepentingan menegaskan pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga pembangunan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam memperkuat tata kelola komoditas berkelanjutan. Hasil diskusi diharapkan dapat mendukung pelembagaan dan peningkatan skala implementasi IYB sebagai instrumen strategis yang mampu meningkatkan daya saing komoditas Indonesia, memperkuat kesejahteraan petani, serta mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat daerah maupun nasional.

4. Lokakarya “Women Empowerment in Agriculture: Voices from the Field”

PISAgro melalui Women Empowerment Working Group menyelenggarakan lokakarya “Women Empowerment in Agriculture: Voices from the Field” pada 20 Mei 2026 di Sinarmas Land Plaza, Jakarta. Kegiatan ini menjadi ruang dialog multipihak yang mempertemukan pemerintah, sektor swasta, organisasi pembangunan, lembaga internasional, serta perempuan petani dari berbagai komoditas untuk mendengarkan langsung pengalaman,

tantangan, dan aspirasi perempuan dalam sistem pertanian Indonesia. Workshop ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap momentum *International Women Farmers' Year 2026* yang diinisiasi oleh FAO.



Kegiatan dibuka oleh Direktur Eksekutif PISAgro, Insan Syafaat, yang menegaskan pentingnya peran perempuan petani sebagai fondasi sistem pertanian dan rantai nilai pangan nasional. Beliau menyampaikan bahwa PISAgro saat ini menjangkau sekitar 2,8 juta petani di Indonesia, dengan sekitar 10–15% di antaranya merupakan perempuan petani. Oleh karena itu, diperlukan program yang lebih terarah dan kolaborasi yang lebih kuat untuk memperluas dampak pemberdayaan perempuan di sektor pertanian.

Dalam sambutannya, *Women Empowerment Working Group Leader*, Suandi Tanuwijanto, menekankan bahwa perempuan petani perlu dipandang tidak hanya sebagai penerima manfaat program sosial, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam rantai nilai pertanian dan pengembangan bisnis. Beliau menyoroti berbagai praktik baik yang menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam kegiatan pascapanen, pengendalian mutu, dan pengelolaan usaha tani berkontribusi terhadap peningkatan kualitas produk dan kinerja usaha pertanian.

Sesi keynote dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disampaikan oleh Ibu Dewa Ayu Laksmi menyoroti pentingnya memperkuat akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat (APKM) bagi perempuan dalam pembangunan dan sistem pertanian. Beliau juga menggarisbawahi berbagai tantangan yang masih dihadapi perempuan, seperti keterbatasan akses terhadap lahan, pembiayaan, teknologi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan, serta pentingnya data terpilah gender dan penganggaran responsif gender dalam mendukung kebijakan yang lebih inklusif.

Sementara itu, Ibu Masyita Taqwa dari BBPSDMP Kementerian Pertanian menekankan bahwa pembangunan pertanian membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat. Beliau menyoroti pentingnya penguatan Kelompok Wanita Tani (KWT), peningkatan kapasitas perempuan dalam pengolahan hasil pertanian bernilai tambah, literasi keuangan, serta pengembangan usaha berbasis pangan lokal yang dapat mendukung ketahanan pangan dan pendapatan keluarga.

Workshop juga menghadirkan sesi berbagi pengalaman bersama perempuan petani dari sektor kakao, kelapa sawit, kopi, serta padi dan kakao. Para peserta berbagi pengalaman mengenai dampak program pemberdayaan yang mereka terima, termasuk pelatihan literasi keuangan, *Village Savings and Loan Association* (VSLA), sekolah lapang sensitif gender, penguatan kepemimpinan perempuan, adaptasi perubahan iklim, hingga pengembangan koperasi petani. Berbagai program tersebut dinilai berhasil meningkatkan kapasitas teknis, kepercayaan diri, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, serta ketahanan ekonomi rumah tangga.

Diskusi juga mengungkap berbagai tantangan yang masih dihadapi perempuan petani, antara lain beban ganda antara pekerjaan domestik dan usaha tani, rendahnya kepercayaan terhadap kepemimpinan perempuan, keterbatasan akses terhadap teknologi

pascapanen, pembiayaan, serta masih terbatasnya ruang partisipasi perempuan dalam forum-forum formal. Meskipun demikian, para perempuan petani menunjukkan bahwa dengan akses, pendampingan, dan kesempatan yang memadai, mereka mampu menjadi pemimpin, penggerak ekonomi keluarga, dan agen perubahan di komunitasnya.

Melalui sesi tanya jawab, peserta dan narasumber juga membahas pentingnya pelibatan perempuan dalam proses perencanaan pertanian, penguatan kelompok perempuan tani, tantangan penerapan praktik pertanian berkelanjutan, serta upaya meningkatkan minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Diskusi menegaskan bahwa pertanian memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan dan perlu dipromosikan sebagai profesi yang modern, inovatif, dan membanggakan bagi perempuan maupun generasi muda.

Workshop ditutup oleh Bapak Suandi Tanuwijanto yang menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan dalam pertanian tidak dapat dipisahkan dari isu akses terhadap pembiayaan, kesehatan keluarga, pendidikan, teknologi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan. Beliau menekankan pentingnya menciptakan ruang partisipasi yang lebih aman dan inklusif bagi perempuan, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, lembaga pembangunan, dan organisasi petani untuk memperluas dampak program pemberdayaan perempuan.

Sebagai tindak lanjut, *Women Empowerment Working Group* PISAgro akan terus mendorong penguatan kolaborasi multipihak guna memperluas akses perempuan petani terhadap pelatihan, teknologi, pembiayaan, pasar, fasilitas pascapanen, serta program pengembangan kepemimpinan. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat peran perempuan sebagai mitra setara dan aktor utama dalam mewujudkan sistem pangan yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan di Indonesia.

5. BEKAL MAPAN oleh CIPS

Suara petani dan nelayan menjadi elemen penting dalam mewujudkan sistem pangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Namun, berbagai tantangan seperti akses pasar yang terbatas, regenerasi pelaku usaha pangan, ketidakpastian kebijakan, hingga perubahan iklim masih menjadi hambatan yang dihadapi para pejuang pangan di lapangan. Untuk membuka ruang dialog yang lebih luas mengenai isu tersebut, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyelenggarakan BEKAL MAPAN (Bersama Kawal Masa Depan Pangan) pada 22–23 Mei 2026 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Kegiatan ini menjadi wadah bagi petani, nelayan, pemerintah, peneliti, pelaku usaha, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk bersama-sama membahas masa depan pangan Indonesia.



PISAgro turut berpartisipasi dalam kegiatan ini melalui Hendri Surya yang bergabung bersama berbagai pemangku kepentingan untuk mendengarkan langsung aspirasi serta pengalaman petani dan nelayan dari berbagai daerah. Beragam sesi diskusi dalam BEKAL MAPAN mengangkat isu-isu strategis seperti akses terhadap sarana

produksi pertanian, kesejahteraan nelayan, regenerasi petani, inovasi pertanian, hingga pentingnya menciptakan kebijakan yang mendukung keberlanjutan usaha pangan di tingkat akar rumput.

Selain menghadirkan forum diskusi, kegiatan ini juga menampilkan pameran foto #SuaraMAPAN dan pemutaran film dokumenter “Besok Kita Nanem Lagi” yang mengangkat realitas kehidupan petani dan nelayan Indonesia. Melalui berbagai rangkaian kegiatan tersebut, BEKAL MAPAN mendorong semakin kuatnya pemahaman publik terhadap peran penting petani dan nelayan sebagai fondasi sistem pangan nasional, sekaligus memperkuat kolaborasi multipihak untuk menciptakan kebijakan dan ekosistem pangan yang lebih berpihak kepada mereka.

6. Lokakarya ASEAN-RAI



Investasi yang bertanggung jawab di sektor pangan, pertanian, dan kehutanan semakin menjadi perhatian penting dalam mendukung ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif. Dalam konteks tersebut, berbagai negara ASEAN terus mendorong implementasi *ASEAN Guidelines on Promoting*

Responsible Investment in Food, Agriculture, and Forestry (ASEAN RAI) sebagai kerangka untuk memastikan investasi di sektor pangan, pertanian, dan kehutanan berjalan secara berkelanjutan, adil, dan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, diselenggarakan Lokakarya Teknis Nasional Penyusunan *Legislative Assessment Tool* melalui Adaptasi ASEAN RAI *Alignment Assessment Tool* pada 21–22 Mei 2026 di Bogor. Kegiatan ini mempertemukan perwakilan parlemen, kementerian dan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, lembaga pembangunan, serta organisasi regional dan internasional untuk membahas penguatan kerangka hukum, kebijakan, dan kelembagaan yang mendukung investasi bertanggung jawab di Indonesia.

PISAgro turut berpartisipasi dalam lokakarya ini yang bertujuan mengadaptasi ASEAN RAI *Alignment Assessment Tool* menjadi instrumen yang lebih relevan bagi fungsi legislatif Indonesia. Melalui pendekatan tersebut, para peserta mendiskusikan berbagai peluang untuk memperkuat pengawasan, penyelarasan kebijakan, serta identifikasi kesenjangan regulasi yang masih perlu diperbaiki guna mendukung praktik investasi yang bertanggung jawab di sektor pangan, pertanian, dan kehutanan.

Dalam kegiatan ini, PISAgro diwakili oleh Fathan Oktrisaf yang berkontribusi dalam diskusi bersama berbagai pemangku kepentingan mengenai tantangan dan peluang implementasi investasi berkelanjutan di Indonesia. Pembahasan mencakup isu-isu strategis seperti ketahanan pangan, keamanan pangan, peningkatan gizi masyarakat, keberlanjutan sistem produksi, regenerasi petani, koordinasi lintas sektor, serta pentingnya memastikan investasi memberikan manfaat yang inklusif bagi petani dan masyarakat perdesaan.

Melalui lokakarya ini, para peserta juga memberikan masukan terhadap struktur, metodologi, dan indikator awal *Legislative Assessment Tool* yang akan digunakan untuk mendukung proses peninjauan kebijakan dan regulasi di tingkat parlemen. Hasil diskusi diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, parlemen, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan dalam mendorong investasi yang lebih bertanggung jawab serta mendukung transformasi sistem pangan, pertanian, dan kehutanan yang berkelanjutan di Indonesia.

7. Dialog Teknis Regional ke-6



Pada 25 Mei 2026, PISAgro bersama Tropical Forest Alliance Southeast Asia (TFA-SEA), Cocoa Sustainability Partnership (CSP), Solidaridad Network Asia, dan European Forest Institute (EFI) menyelenggarakan Regional Technical Dialogue #6 (RTD#6) bertajuk “EUDR Preparedness in Practice: Lessons from Dry Runs for Effective Implementation”. Kegiatan yang berlangsung secara hybrid antara Jakarta dan Putrajaya, Malaysia, ini menjadi penutup rangkaian dialog teknis SAFE (*Sustainable Agriculture for Forest Ecosystems*) yang selama dua tahun terakhir

membahas kesiapan negara-negara produsen komoditas dalam menghadapi implementasi *European Union Deforestation Regulation* (EUDR).

RTD#6 berfokus pada pembelajaran dari berbagai *dry run* atau simulasi kesiapan EUDR yang telah dilakukan untuk menguji proses due diligence, sistem ketertelusuran, kualitas data geolokasi, serta kesiapan pelaku rantai pasok dalam memenuhi persyaratan EUDR. Forum ini menyoroti bagaimana simulasi tersebut dapat membantu pelaku usaha, pemerintah, dan otoritas terkait mengidentifikasi kesenjangan data, memperjelas ekspektasi kepatuhan, serta membangun pemahaman bersama mengenai implementasi EUDR secara praktis tanpa konsekuensi hukum.

Kegiatan dibuka dengan pemaparan perkembangan terkini EUDR dan dilanjutkan dengan sesi refleksi atas pembelajaran utama dari enam seri Regional Technical Dialogue yang telah dilaksanakan sejak 2024. Sesi ini difasilitasi oleh Direktur Eksekutif PISAgro, Bapak Insan Syafaat, bersama Dr. Tey Yeong Sheng dari Universiti Putra Malaysia, yang mengajak peserta mengidentifikasi capaian, tantangan, dan peluang kolaborasi dalam memperkuat kesiapan rantai pasok komoditas berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.

Diskusi mendalam juga dilakukan melalui sesi *country deep dive* yang menghadirkan perwakilan pemerintah, sektor swasta, dan lembaga teknis dari Indonesia dan Malaysia. Pembahasan mencakup penguatan sistem ketertelusuran, integrasi data geospasial, peningkatan kualitas dokumentasi legalitas, serta upaya memastikan keterlibatan petani kecil dalam rantai pasok yang memenuhi standar keberlanjutan global. Para peserta menekankan pentingnya interoperabilitas sistem, harmonisasi kebijakan, dan penguatan kapasitas pelaku rantai pasok sebagai faktor kunci dalam mendukung implementasi EUDR.

Sesi utama mengenai EUDR *Dry Runs* yang dipandu oleh *European Forest Institute* (EFI) memberikan gambaran praktis mengenai proses pengujian sistem *due diligence*, mulai dari pengiriman *due diligence statement* ke sistem Uni Eropa, verifikasi data geolokasi hingga tingkat plot lahan, penilaian risiko, hingga simulasi pemeriksaan oleh otoritas berwenang Uni Eropa. Diskusi juga menyoroti pentingnya informasi yang memadai, konklusif, dan dapat diverifikasi sebagai dasar pembuktian kepatuhan terhadap persyaratan EUDR.

Sebagai penutup rangkaian *SAFE RTD Series*, forum ini menegaskan bahwa kesiapan menghadapi EUDR tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan regulasi, tetapi juga merupakan peluang untuk memperkuat daya saing komoditas Indonesia dan Malaysia melalui rantai pasok yang lebih transparan, inklusif, dan bebas deforestasi. Hasil diskusi diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, organisasi petani, dan mitra pembangunan dalam mempercepat implementasi sistem ketertelusuran dan *due diligence* yang kredibel serta mendukung akses pasar jangka panjang bagi komoditas berkelanjutan dari kawasan Asia Tenggara.

8. Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) 2026

Pengembangan ekonomi daerah menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, penguatan sektor unggulan berbasis potensi lokal, peningkatan akses pembiayaan, serta kolaborasi lintas sektor menjadi faktor kunci dalam mendorong daya saing dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. Dalam konteks tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan Konferensi Nasional Pengembangan

Ekonomi Daerah (KNPED) 2026 dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Sinergi Kebijakan Lintas Sektor” pada 25 Mei 2026 di Balai Kartini, Jakarta.

Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah pusat dan daerah, sektor jasa keuangan, dunia usaha, akademisi, serta organisasi pembangunan untuk membahas strategi percepatan pengembangan ekonomi daerah. Forum ini juga menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui pembiayaan yang lebih inklusif, produktif, dan tepat sasaran, khususnya pada sektor-sektor unggulan daerah.

PISAgro turut berpartisipasi dalam kegiatan ini melalui kehadiran Hendri Surya dan Haridi Walid yang bergabung bersama para pemangku kepentingan dalam berbagai sesi diskusi dan pertukaran pengetahuan. Berbagai pembahasan dalam KNPED 2026 menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor jasa keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membangun ekosistem ekonomi daerah yang mampu menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Selain membahas penguatan akses pembiayaan dan investasi daerah, diskusi juga mengangkat berbagai praktik baik pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, termasuk sektor agrikultur, UMKM, ekonomi kreatif, dan industri hilir yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Para narasumber menekankan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi daerah memerlukan pendekatan yang terintegrasi, mulai dari perencanaan, pembiayaan, penguatan kapasitas pelaku usaha, hingga pengembangan rantai nilai yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui forum ini, para peserta menegaskan pentingnya memperkuat

sinergi kebijakan lintas sektor dan lintas wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh Indonesia. KNPED 2026 diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperluas kolaborasi, memperkuat ekosistem pengembangan ekonomi daerah, serta mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

9. RAFT APAC Collaborative Learning Series: Mengurangi Food Loss dan Food Waste di ASEAN

Susut dan sisa pangan (*food loss and food waste*) masih menjadi salah satu tantangan utama dalam mewujudkan sistem pangan yang berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik. Selain berdampak pada efisiensi rantai pasok dan ketahanan pangan, isu ini juga berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca, hilangnya nilai ekonomi, serta berkurangnya pendapatan bagi pelaku usaha dan petani. Untuk mendorong pertukaran pengetahuan dan solusi kolaboratif dalam mengatasi tantangan tersebut, *Regional Agri-Food Transition (RAFT) APAC Collaborative* melalui Catalyst Now Asia Pacific menyelenggarakan Learning Series 1: Session 2 bertajuk “Rescuing the Missing Third: Scanning ASEAN Supply Chain Interventions for Food Loss and Food Waste” pada 28 Mei 2026 secara daring.

Kegiatan ini menghadirkan para pemimpin dan praktisi dari berbagai organisasi yang bergerak di bidang pertanian berkelanjutan, inovasi rantai pasok, dan transformasi sistem pangan di kawasan ASEAN. Diskusi berfokus pada berbagai pendekatan dan praktik baik untuk mengurangi kehilangan dan pemborosan pangan di sepanjang rantai nilai pertanian, mulai dari tahap produksi, pascapanen, distribusi, hingga konsumsi.

PISAgro turut berpartisipasi dalam forum ini melalui Direktur

Eksekutif PISAgro, Insan Syafaat, yang hadir sebagai narasumber bersama perwakilan dari Beanstalk Agtech, Koltiva, Wavemaker, dan Rejuvrth. Dalam diskusi, para pembicara berbagi pengalaman mengenai pemanfaatan teknologi, penguatan kemitraan rantai pasok, peningkatan kapasitas petani, serta pentingnya kolaborasi multipihak untuk mengurangi kehilangan hasil pertanian dan meningkatkan efisiensi sistem pangan.

Sesi diskusi juga menyoroti berbagai peluang untuk memperkuat ketertelusuran, pengelolaan data, inovasi pascapanen, dan model bisnis sirkular yang dapat membantu meminimalkan kehilangan pangan sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi petani dan pelaku usaha. Para peserta menekankan bahwa upaya mengurangi *food loss and food waste* memerlukan pendekatan sistemik yang melibatkan sektor publik, swasta, akademisi, lembaga pembangunan, serta masyarakat secara luas.

Melalui forum ini, para pemangku kepentingan memperkuat komitmen bersama untuk mendorong transformasi sistem pangan yang lebih efisien, inklusif, dan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Pertukaran pengalaman dan pembelajaran yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan berbagai inisiatif yang mendukung ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani, serta pencapaian target keberlanjutan di tingkat regional maupun global.

Highlights

1. FGD “Food Sovereignty in Focus: Developing Indonesia’s Protein Capacity”

Strengthening Indonesia’s domestic protein capacity has become an increasingly strategic priority in supporting national food sovereignty amid growing global food security challenges, geopolitical tensions, supply chain disruptions, and the need to ensure the availability of affordable, nutritious, and sustainable food for the population.

PISAgro participated in the Focus Group Discussion (FGD) entitled “Food Sovereignty in Focus: Developing Indonesia’s Protein Capacity”, organized by the Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) on 5 May 2026 in Jakarta. PISAgro Executive Director, Insan Syafaat, served as a panelist in the discussion. The event brought together representatives from government institutions, parliament, industry, business associations, academia, and policy experts to discuss the challenges and strategic opportunities for strengthening Indonesia’s protein ecosystem amid evolving geopolitical dynamics and increasing food security concerns.

The FGD was organized as part of Prasasti’s effort to gather stakeholder perspectives on the current state of Indonesia’s protein industry and to enrich research and policy recommendations aimed at sustainably increasing domestic protein production capacity.

During the opening session, the Prasasti team presented an overview of the national and global protein landscape, including the impacts of geopolitical tensions, supply chain disruptions, and the growing urgency of strengthening domestic production capacity to ensure affordable, high-quality, and sustainable protein availability for Indonesian consumers.

Discussions focused on several structural challenges facing

Indonesia's protein ecosystem, including the gap between demand and domestic production capacity, price volatility, inadequate cold-chain and distribution infrastructure, inconsistent product quality, and limited market access for small-scale producers. Participants also highlighted the importance of increasing productivity through technology adoption, improved production practices and business management, and the development of more integrated support systems.

During the discussion, Mr. Insan Syafaat emphasized the importance of multi-stakeholder collaboration in strengthening national food and protein supply chains. He noted that increasing production capacity cannot be achieved through sectoral approaches alone but requires stronger synergy among government, the private sector, farmers, livestock producers, civil society organizations, and development partners to improve productivity, sustainability, and inclusiveness within Indonesia's food system.

The discussion also underscored the importance of building a resilient protein ecosystem through strengthening farmers' and livestock producers' capacities, improving access to technology and financing, developing supporting infrastructure, and creating a conducive business environment for investment and innovation. Participants further stressed the need for policies capable of addressing global challenges while enhancing the competitiveness of Indonesia's protein industry.

Through this FGD, stakeholders identified various opportunities and preliminary recommendations to support the development of Indonesia's protein capacity. The outcomes of the discussion will contribute to future research, policy briefs, and advocacy initiatives aimed at strengthening national food sovereignty through a more productive, sustainable, and resilient protein ecosystem.

The event highlighted the importance of multi-stakeholder dialogue in formulating solutions to national food security challenges while reinforcing a shared commitment to building a food system capable of meeting the nutritional needs of the population and responding to future global pressures.

2. FGD on the Readiness Study for the Implementation of Indonesian Sustainable Cocoa (ISCocoa)



In line with Indonesia's commitment to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) and supporting efforts to reduce greenhouse gas emissions and protect the environment, the development of sustainable cocoa plantations has become a critical step toward achieving these objectives. To support this effort, a comprehensive and standardized framework is needed to consolidate sustainability principles and criteria into a nationally recognized guideline that is globally aligned, thereby reducing the economic burden on farmers and simplifying the implementation of sustainability standards.

On 6 January 2026, the Directorate General of Estate Crops issued the Indonesian Sustainable Cocoa (ISCocoa) Guidelines through Decree No. 19/KB.410/01/2026. The guidelines are intended to provide direction

for stakeholders—including government agencies, private-sector actors, farmers, cooperatives, and civil society organizations—in implementing sustainable practices throughout the cocoa value chain.

As part of preparations for ISCocoa implementation and to align stakeholder understanding regarding sustainable cocoa plantation management, the Directorate General of Estate Crops organized the Focus Group Discussion (FGD) on the Readiness Study for the Implementation of Indonesian Sustainable Cocoa on 13 May 2026 in Bogor. The event aimed to gather input and recommendations for the implementation of ISCocoa as a national reference framework for sustainable cocoa development in Indonesia. PISAgro participated in the discussion through the attendance of Ferial Lubis and Hendri Surya, alongside representatives from government agencies, private companies, development organizations, and other relevant stakeholders.

The Indonesian Sustainable Cocoa Guidelines are built around three key pillars:

1. Environmental Aspect: Protecting ecosystems and maintaining soil health.
2. Economic Aspect: Enhancing competitiveness and improving the welfare of farmers and business actors.
3. Social Aspect: Ensuring workers' rights and occupational safety.

The guidelines are also intended to improve productivity, product quality, and the global competitiveness of Indonesian cocoa.

To further refine the guidelines, the Directorate General of Estate Crops has engaged various stakeholders through a series of consultations. Based on its assessment, ISCocoa has been found to align with several international standards, including ISO 34101, Rainforest Alliance (RA), and Fairtrade (FT).

To assess the applicability of the guidelines at the farm level, field trials will be conducted between May and July 2026 through interviews with cocoa farmers in Central Sulawesi, Lampung, Yogyakarta Special Region, Bali, and South Sulawesi.

The field assessment will evaluate six dimensions:

1. Land Legality: Land certificates, Cultivation Registration Certificates (STDB), and compliance with spatial planning regulations.
2. Good Agricultural Practices (GAP): Use of certified seedlings, pruning, irrigation, and pest and disease management.
3. Nature Conservation: Terracing, buffer zones, and waste and emissions management.
4. Occupational Health and Safety (OHS) and Workers' Rights: Use of personal protective equipment (PPE), equal rights, prohibition of child labor, and compliance with minimum wage regulations.
5. Social Responsibility: Community welfare and development initiatives.
6. Business Management: Price transparency, traceability standard operating procedures (SOPs), and anti-bribery measures..

In addition to technical and social aspects, the study will also assess the financial implications of certification for smallholder cocoa farmers through two indicators:

1. Willingness to Pay: Whether farmers are willing to bear certification costs if certification becomes mandatory.
2. Ability to Pay: Whether farmers have sufficient financial capacity to cover certification costs independently.

The results of the field survey are expected to be presented and discussed further during a workshop scheduled for August 2026.

3. National Socialization and Dissemination of the Sustainable Jurisdiction Indicator Platform



Strengthening sustainable commodity governance has become increasingly important amid rising global demands for supply chain transparency, product traceability, and compliance with sustainability standards. Through a jurisdictional approach, Indonesia seeks to enhance collaboration among government institutions, the private sector, farmers, and other stakeholders to ensure that commodity development remains productive, competitive, inclusive, and sustainable. In this context, the Ministry of National Development Planning (Bappenas) organized the National Socialization and Dissemination of the Sustainable Jurisdiction Indicator (SJI) Platform as a multi-stakeholder forum to strengthen the implementation of sustainable commodity governance in Indonesia.

The event brought together representatives from ministries and government agencies, local governments, private-sector companies, research institutions, development partners, and civil society organizations to discuss the role of the Sustainable Jurisdiction Indicator (SJI) in supporting more integrated, transparent, and

accountable commodity governance. It also served as an important platform to introduce and strengthen the positioning of SJI as a national instrument that can support cross-sector data integration, evidence-based decision-making, and the competitiveness of Indonesian commodities in global markets.

PISAgro participated in the event as part of its commitment to promoting more sustainable agricultural systems and supply chains. PISAgro Executive Director Insan Syafaat served as a panelist in the talk show session titled “Strengthening Jurisdictional Sustainability Governance through SJI: Aligning Policies, Systems, and Institutions for Sustainable Commodity Governance”, alongside representatives from the Ministry of Home Affairs, CIFOR-ICRAF, and local governments.

The discussion highlighted the importance of strengthening partnerships among government institutions, the private sector, and farmers to support sustainability standards implementation, improve supply chain traceability, and develop integrated data systems. Panelists also discussed challenges in implementing sustainability at the field level, including cross-sector policy harmonization, data interoperability, local government capacity building, and ensuring that smallholders can participate in supply chains that meet global market requirements.

The forum further explored opportunities to scale up SJI implementation through multi-stakeholder collaboration, sustainable investment, market commitments, and the development of credible monitoring and reporting systems. The jurisdictional approach was recognized as a powerful mechanism for improving coordination among stakeholders, increasing the effectiveness of commodity development programs, and supporting national targets related to sustainable development, food security, and emissions reduction.

Through the forum, stakeholders reaffirmed the importance of stronger collaboration among government agencies, businesses, development organizations, academic institutions, and civil society organizations in strengthening sustainable commodity governance. The outcomes are expected to support the institutionalization and scaling up of SJI as a strategic tool to improve commodity competitiveness, enhance farmer livelihoods, and promote inclusive and sustainable economic development at both local and national levels.

4. Workshop “Women Empowerment in Agriculture: Voices from the Field”



PISAgro, through its Women Empowerment Working Group, organized the workshop “Women Empowerment in Agriculture: Voices from the Field” on 20 May 2026 at Sinarmas Land Plaza, Jakarta. The event served as a multi-stakeholder dialogue platform bringing together government representatives, private-sector actors, development organizations, international institutions, and women farmers from various commodity sectors to share experiences, challenges, and aspirations within Indonesia’s agricultural system. The workshop also

formed part of the broader momentum surrounding the International Women Farmers' Year 2026 initiative led by the Food and Agriculture Organization (FAO).

The event was opened by PISAgro Executive Director Insan Syafaat, who emphasized the critical role of women farmers as the foundation of Indonesia's agricultural system and food value chains. He noted that PISAgro currently reaches approximately 2.8 million farmers across Indonesia, of whom an estimated 10–15% are women farmers. Therefore, more targeted programs and stronger collaboration are needed to expand the impact of women's empowerment initiatives in agriculture.

In his remarks, Suandi Tanuwijanto, Leader of the Women Empowerment Working Group, stressed that women farmers should not merely be viewed as beneficiaries of social programs but as strategic partners in agricultural value chains and agribusiness development. He highlighted various good practices demonstrating that women's involvement in post-harvest activities, quality control, and farm business management contributes significantly to improved product quality and agricultural business performance.

The keynote session delivered by Dewa Ayu Laksmi from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection emphasized the importance of strengthening women's access, participation, control, and benefits (APKM) within development and agricultural systems. She also outlined persistent challenges faced by women, including limited access to land, financing, technology, leadership opportunities, and decision-making processes, as well as the need for gender-disaggregated data and gender-responsive budgeting to support more inclusive policies.

Meanwhile, Masyita Taqwa from the Agricultural Human Resources

Development and Extension Agency (BBPSDMP), Ministry of Agriculture, highlighted the importance of strong cross-sector collaboration in agricultural development. She emphasized the need to strengthen Women Farmers Groups (KWT), enhance women's capacity in value-added agricultural processing, improve financial literacy, and support local food-based enterprises that contribute to food security and household income generation.

The workshop also featured experience-sharing sessions with women farmers from the cocoa, oil palm, coffee, rice, and cocoa sectors. Participants shared the impacts of empowerment programs they had received, including financial literacy training, Village Savings and Loan Associations (VSLA), gender-sensitive farmer field schools, women's leadership development, climate change adaptation initiatives, and farmer cooperative strengthening programs. These interventions were recognized for improving technical skills, self-confidence, participation in decision-making, and household economic resilience.

Discussions also highlighted challenges that women farmers continue to face, including the double burden of domestic responsibilities and farming activities, limited trust in women's leadership, inadequate access to post-harvest technologies and financing, and limited participation in formal decision-making forums. Nevertheless, participants demonstrated that with adequate access, support, and opportunities, women can become effective leaders, drivers of household economic growth, and agents of change within their communities.

Through interactive discussions and Q&A sessions, participants and speakers explored the importance of involving women in agricultural planning processes, strengthening women farmer groups, addressing challenges in sustainable agriculture adoption, and increasing youth

interest in agriculture. The discussions reaffirmed that agriculture offers promising economic opportunities and should be promoted as a modern, innovative, and rewarding profession for both women and younger generations.

The workshop concluded with closing remarks from Suandi Tanuwijanto, who emphasized that women's empowerment in agriculture cannot be separated from issues related to financing, family health, education, technology, leadership, and decision-making. He stressed the importance of creating safer and more inclusive spaces for women's participation and strengthening collaboration among government institutions, private-sector actors, civil society organizations, development partners, and farmer organizations.

As a follow-up, the PISAgro Women Empowerment Working Group will continue to promote multi-stakeholder collaboration to expand women farmers' access to training, technology, financing, markets, post-harvest facilities, and leadership development programs. These efforts are expected to strengthen women's role as equal partners and key actors in building a more inclusive, resilient, and sustainable food system in Indonesia.

5. BEKAL MAPAN by CIPS

The voices of farmers and fishers are essential elements in building a resilient, inclusive, and sustainable food system in Indonesia. However, various challenges such as limited market access, the regeneration of food producers, policy uncertainty, and climate change continue to hinder those working on the frontlines of food production. To create a broader platform for dialogue on these issues, the Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) organized BEKAL MAPAN (Bersama Kawal Masa Depan Pangan / Safeguarding the Future of Food Together) on 22–23 May 2026 at Taman Ismail Marzuki, Jakarta. The event served as a

forum for farmers, fishers, government representatives, researchers, businesses, students, and the general public to collectively discuss the future of Indonesia's food system.



PISAgro participated in this event through the attendance of Hendri Surya, who joined various stakeholders in listening directly to the aspirations and experiences of farmers and fishers from different regions across Indonesia. The discussions throughout BEKAL MAPAN addressed strategic issues such as access to agricultural inputs, fishers' welfare, farmer regeneration, agricultural innovation, and the importance of creating policies that support sustainable food enterprises at the grassroots level.

In addition to discussion forums, the event featured the #SuaraMAPAN photo exhibition and the screening of the documentary film “Besok Kita Nanem Lagi” (Tomorrow We Plant Again), which highlighted the realities of life faced by Indonesian farmers and fishers. Through these activities, BEKAL MAPAN strengthened public understanding of the critical role farmers and fishers play as the foundation of Indonesia's food system, while also reinforcing multi-stakeholder collaboration to develop policies and food system ecosystems that better support their needs.

6. ASEAN-RAI Workshop



Responsible investment in the food, agriculture, and forestry sectors has become increasingly important in supporting food security, environmental sustainability, and inclusive economic development. In this context, ASEAN member states continue to promote the implementation of the ASEAN Guidelines on Promoting Responsible Investment in Food, Agriculture, and Forestry (ASEAN RAI) as a framework to ensure that investments in these sectors are sustainable, equitable, and beneficial to all stakeholders.

As part of these efforts, the National Technical Workshop on Developing a Legislative Assessment Tool through the Adaptation of the ASEAN RAI Alignment Assessment Tool was held on 21–22 May 2026 in Bogor. The workshop brought together representatives from parliament, government ministries and agencies, civil society organizations, the private sector, development partners, and regional and international organizations to discuss the strengthening of legal, policy, and institutional frameworks that support responsible investment in Indonesia.

PISAgro participated in the workshop, which aimed to adapt the ASEAN RAI Alignment Assessment Tool into an instrument more relevant to Indonesia's legislative functions. Through this approach, participants discussed opportunities to strengthen oversight mechanisms, improve policy alignment, and identify regulatory gaps that still need to be addressed to support responsible investment practices in the food, agriculture, and forestry sectors.

PISAgro was represented by Fathan Oktrisaf, who contributed to discussions with various stakeholders on the challenges and opportunities related to the implementation of sustainable investment in Indonesia. The discussions covered strategic issues such as food security, nutrition improvement, sustainable production systems, farmer regeneration, cross-sector coordination, and the importance of ensuring that investments provide inclusive benefits for farmers and rural communities.

Through this workshop, participants also provided input on the structure, methodology, and preliminary indicators of the Legislative Assessment Tool, which will be used to support policy and regulatory review processes at the parliamentary level. The outcomes of the discussions are expected to strengthen collaboration among government institutions, parliament, the private sector, civil society organizations, and development partners in promoting more responsible investment and supporting the sustainable transformation of Indonesia's food, agriculture, and forestry systems.

7. Regional Technical Dialogue #6

On 25 May 2026, PISAgro, together with Tropical Forest Alliance Southeast Asia (TFA-SEA), Cocoa Sustainability Partnership (CSP), Solidaridad Network Asia, and the European Forest Institute (EFI),

organized Regional Technical Dialogue #6 (RTD#6) titled “EUDR Preparedness in Practice: Lessons from Dry Runs for Effective Implementation.” Held in a hybrid format connecting Jakarta and Putrajaya, Malaysia, the event marked the conclusion of the SAFE (Sustainable Agriculture for Forest Ecosystems) Regional Technical Dialogue Series, which over the past two years has explored the preparedness of commodity-producing countries for the implementation of the European Union Deforestation Regulation (EUDR).



RTD#6 focused on lessons learned from various EUDR dry runs and readiness simulations conducted to test due diligence processes, traceability systems, geolocation data quality, and supply chain actors’ preparedness in meeting EUDR requirements. The forum highlighted how such simulations can help businesses, governments, and relevant authorities identify data gaps, clarify compliance expectations, and build a shared understanding of practical EUDR implementation without legal consequences.

The event opened with an update on recent EUDR developments, followed by a reflection session on key lessons learned from the six Regional Technical Dialogue series conducted since 2024. The session was facilitated by Mr. Insan Syafaat, Executive Director of PISAgro,

together with Dr. Tey Yeong Sheng of Universiti Putra Malaysia, who guided participants in identifying achievements, challenges, and opportunities for collaboration to strengthen sustainable commodity supply chain readiness across Southeast Asia.

In-depth discussions were also conducted through a country deep-dive session featuring representatives from government agencies, private sector organizations, and technical institutions from Indonesia and Malaysia. Topics included strengthening traceability systems, integrating geospatial data, improving the quality of legal compliance documentation, and ensuring the inclusion of smallholder farmers in supply chains that meet global sustainability standards. Participants emphasized the importance of system interoperability, policy harmonization, and capacity building among supply chain actors as key factors for successful EUDR implementation.

The main session on EUDR Dry Runs, led by the European Forest Institute (EFI), provided practical insights into testing due diligence systems, including the submission of due diligence statements to European Union systems, verification of geolocation data down to plot level, risk assessment procedures, and simulations of inspections by competent EU authorities. Discussions also underscored the importance of information that is sufficient, conclusive, and verifiable as the basis for demonstrating compliance with EUDR requirements.

As the concluding event of the SAFE RTD Series, the forum reaffirmed that EUDR preparedness is not solely about regulatory compliance but also represents an opportunity to enhance the competitiveness of Indonesian and Malaysian commodities through more transparent, inclusive, and deforestation-free supply chains. The outcomes of the discussions are expected to serve as a reference for governments, businesses, financial institutions, farmer organizations, and

development partners in accelerating the implementation of credible traceability and due diligence systems, while supporting long-term market access for sustainable commodities from Southeast Asia.

8. National Conference on Regional Economic Development (KNPED) 2026

Regional economic development has become one of the key pillars in strengthening inclusive and sustainable national economic growth. Amid increasingly complex global economic dynamics, strengthening leading sectors based on local potential, expanding access to financing, and fostering cross-sector collaboration are critical factors in enhancing competitiveness and improving community welfare across regions. In this context, the Financial Services Authority (OJK) organized the 2026 National Conference on Regional Economic Development (KNPED) under the theme “Accelerating Regional Economic Growth through Cross-Sector Policy Synergy” on 25 May 2026 at Balai Kartini, Jakarta.

The conference brought together a wide range of stakeholders from central and regional governments, the financial services sector, businesses, academia, and development organizations to discuss strategies for accelerating regional economic development. The forum also served as a platform to strengthen inter-institutional synergy in optimizing local economic potential through more inclusive, productive, and targeted financing, particularly in priority regional sectors.

PISAgro participated in the event through the attendance of Hendri Surya and Haridi Walid, who joined fellow stakeholders in various discussion sessions and knowledge-sharing exchanges. Discussions throughout KNPED 2026 highlighted the importance of collaboration among government institutions, financial service providers, businesses, and communities in building regional economic ecosystems capable

of creating added value, expanding employment opportunities, and enhancing national economic competitiveness.

In addition to addressing the strengthening of regional financing and investment access, the discussions also showcased best practices in local potential-based economic development, including the agriculture sector, micro, small, and medium enterprises (MSMEs), the creative economy, and downstream industries that contribute to regional economic growth. Speakers emphasized that successful regional economic development requires an integrated approach, encompassing planning, financing, capacity building for business actors, and value chain development that delivers tangible benefits to local communities.

Through this forum, participants reaffirmed the importance of strengthening cross-sectoral and cross-regional policy synergies to promote more equitable economic growth throughout Indonesia. KNPED 2026 is expected to serve as a catalyst for expanding collaboration, strengthening regional economic development ecosystems, and supporting the realization of sustainable and inclusive national economic growth.

9. RAFT APAC Collaborative Learning Series: Reducing Food Loss and Food Waste in ASEAN

Food loss and food waste remain among the major challenges in achieving sustainable food systems across the Asia-Pacific region. Beyond their impact on supply chain efficiency and food security, these issues also contribute to greenhouse gas emissions, economic losses, and reduced incomes for farmers and agribusiness actors. To promote knowledge exchange and collaborative solutions to these challenges, the Regional Agri-Food Transition (RAFT) APAC

Collaborative, through Catalyst Now Asia Pacific, organized Learning Series 1: Session 2, entitled “Rescuing the Missing Third: Scanning ASEAN Supply Chain Interventions for Food Loss and Food Waste,” on 28 May 2026 in a virtual format.

The event brought together leaders and practitioners from various organizations working in sustainable agriculture, supply chain innovation, and food system transformation across the ASEAN region. Discussions focused on a range of approaches and best practices for reducing food loss and waste throughout agricultural value chains, from production and post-harvest handling to distribution and consumption.

PISAgro participated in the forum through its Executive Director, Mr. Insan Syafaat, who served as a speaker alongside representatives from Beanstalk Agtech, Koltiva, Wavemaker, and Rejuvrth. During the discussion, speakers shared experiences on leveraging technology, strengthening supply chain partnerships, enhancing farmer capacity, and fostering multi-stakeholder collaboration to reduce agricultural losses and improve food system efficiency.

The discussion session also highlighted opportunities to strengthen traceability systems, data management, post-harvest innovations, and circular business models that can help minimize food loss while creating greater value for farmers and agribusinesses. Participants emphasized that addressing food loss and food waste requires a systemic approach involving the public sector, private sector, academia, development organizations, and society at large.

Through this forum, stakeholders reinforced their shared commitment to advancing more efficient, inclusive, and sustainable food systems across Southeast Asia. The exchange of experiences and lessons learned is expected to serve as a valuable reference for developing

initiatives that support food security, improve farmer livelihoods, and contribute to achieving sustainability targets at both regional and global levels.

Profil

Memberdayakan Petani: Kisah Ibu Ayu, Petani Perempuan Binaan Rikolto dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan

Fathan Oktrisaf, Ferial Lubis,
Hendri Surya Widcaksana



Pagi hari di salah satu sentra kakao di Kabupaten Luwu Utara, Ibu Ayu memulai aktivitasnya di kebun dengan semangat yang sama seperti yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun. Bagi Ayu, pertanian bukan sekadar sumber penghidupan, tetapi juga ruang untuk belajar, bertumbuh, dan membawa perubahan bagi komunitas di sekitarnya.

Selain aktif sebagai petani kakao, Ayu juga dipercaya menjadi ketua koperasi pertanian perempuan pertama di Luwu Utara. Peran tersebut memberinya kesempatan untuk mendorong lebih banyak perempuan agar terlibat dalam pengembangan usaha tani, penguatan ekonomi keluarga, serta kepemimpinan di tingkat komunitas.

Perjalanan Ayu menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam sektor pertanian. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akses terhadap sumber daya hingga kesempatan pengembangan kapasitas, perempuan petani terus menunjukkan ketangguhan dan kontribusi nyata dalam menjaga keberlanjutan pertanian.

Melalui pendampingan yang diterimanya dari Rikolto, Ayu merasakan manfaat dari peningkatan kapasitas teknis, penguatan kelembagaan petani, serta dukungan bagi perempuan dan generasi muda untuk mengambil peran yang lebih besar dalam sektor pertanian.

Dalam wawancara berikut, Ibu Ayu berbagi kisah tentang perjalanan hidupnya sebagai petani kakao, tantangan yang dihadapi perempuan dalam pertanian, serta harapannya bagi masa depan petani dan generasi muda Indonesia.

1. Selamat pagi, Ibu Ayu. Boleh Ibu ceritakan sedikit tentang diri Ibu, Bagaimana awalnya Ibu bisa mulai bertani kakao?

Saya adalah seorang ibu, petani, dan ketua koperasi yang percaya bahwa perubahan besar sering kali berawal dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan dengan konsisten.

Saat ini, saya dipercaya menjadi ketua koperasi pertanian perempuan pertama di Luwu Utara, sebuah amanah yang saya terima dengan penuh rasa syukur sekaligus tanggung jawab untuk membuka lebih banyak ruang bagi perempuan agar dapat tumbuh, berdaya, dan mengambil peran dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

Perjalanan saya tidak hanya berada di kebun atau dalam kegiatan koperasi. Sejak lama, saya juga aktif terlibat dalam berbagai organisasi perempuan dan anak muda. Dari ruang-ruang diskusi, kegiatan sosial, hingga pendampingan masyarakat, saya belajar bahwa setiap orang memiliki potensi yang luar biasa ketika diberi kesempatan untuk berkembang. Pengalaman-pengalaman itulah yang membentuk cara pandang saya tentang kepemimpinan: bukan

tentang berjalan paling depan, melainkan tentang mengajak lebih banyak orang untuk maju bersama.

Meski memiliki berbagai aktivitas, hati saya selalu kembali pada pertanian. Ada masa ketika saya menyadari bahwa dunia pertanian bukan sekadar pekerjaan atau sumber penghasilan, melainkan panggilan yang saya cintai. Saya jatuh cinta pada prosesnya melihat benih tumbuh, merawat tanaman dengan penuh kesabaran, hingga menyaksikan hasil panen yang menjadi buah dari kerja keras dan harapan. Karena itulah saya memilih untuk fokus menjadi petani, khususnya dalam pengembangan kakao, sembari terus mendorong lahirnya petani-petani tangguh di sekitar saya.

Namun, jika ada pencapaian yang paling saya banggakan di atas semua peran dan jabatan yang saya miliki, itu adalah menjadi seorang ibu. Saya adalah ibu dari putra dan putri yang luar biasa, yang setiap hari mengajarkan saya arti ketulusan, kesabaran, dan semangat untuk terus belajar. Mereka adalah alasan mengapa saya terus melangkah, bahkan ketika menghadapi tantangan. Dari merekalah saya belajar bahwa keberhasilan sejati bukan hanya tentang apa yang kita capai untuk diri sendiri, tetapi juga tentang nilai-nilai yang kita wariskan kepada generasi berikutnya.

Ketika saya menengok perjalanan ini, saya teringat pada banyak perempuan di desa yang bekerja tanpa banyak sorotan, para petani yang tetap berjuang meski menghadapi berbagai keterbatasan, dan anak-anak muda yang menyimpan mimpi besar untuk masa depan. Kisah saya hanyalah satu dari sekian banyak kisah tentang harapan, kerja keras, dan keyakinan bahwa dengan gotong royong, keberanian, serta kemauan untuk terus belajar, kita semua dapat menciptakan perubahan yang berarti bagi keluarga, komunitas, dan daerah yang kita cintai.

2. Menurut Ibu, sebagai perempuan petani kakao, tantangan apa yang paling besar yang Ibu hadapi saat ini?

Menurut saya, perempuan dan laki-laki memiliki kemampuan yang sama untuk menjadi petani yang baik. Namun dalam praktiknya, perempuan sering menghadapi tantangan yang berbeda. Banyak perempuan terlibat hampir di seluruh rantai usaha kakao, tetapi kontribusinya masih sering kurang terlihat atau kurang diakui.

Dalam hal akses lahan, modal, dan pelatihan, perempuan juga masih menghadapi berbagai keterbatasan. Banyak perempuan mengelola kebun tetapi kepemilikan lahannya masih atas nama anggota keluarga laki-laki. Selain itu, mereka harus membagi waktu antara pekerjaan rumah tangga dan kegiatan pertanian sehingga kesempatan mengikuti pelatihan atau mengakses informasi sering kali lebih terbatas.

Dalam beberapa tahun terakhir, kami juga menghadapi tantangan ekonomi dan lingkungan yang cukup berat. Kenaikan biaya produksi, perubahan iklim, serta serangan hama dan penyakit tanaman memengaruhi produktivitas kebun. Di sisi lain, akses terhadap pasar yang menghargai kualitas kakao juga masih perlu diperkuat.

Karena itu, tantangan terbesar bukan hanya soal harga, tetapi bagaimana petani dapat meningkatkan produktivitas, menjaga kualitas, dan memperoleh akses pasar yang lebih baik agar usaha tani benar-benar memberikan kesejahteraan yang berkelanjutan.

3. Menurut Ibu, perubahan apa yang paling terlihat terhadap posisi dan peran perempuan petani di komunitas saat ini?

Sejauh ini, perubahan yang paling saya rasakan adalah semakin terbukanya ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga, kelompok tani, maupun koperasi. Jika beberapa tahun lalu perempuan sering dipandang hanya sebagai pendamping dalam usaha pertanian, sekarang semakin banyak yang mulai diakui sebagai petani, pengelola

usaha, bahkan pemimpin di komunitasnya.

Melalui berbagai program yang saya ikuti, saya melihat perempuan mendapatkan lebih banyak akses terhadap pelatihan, pengetahuan teknis, pengelolaan keuangan, dan penguatan kapasitas kepemimpinan. Hal ini memberikan dampak yang nyata, bukan hanya pada peningkatan keterampilan bertani, tetapi juga pada rasa percaya diri perempuan untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan usaha tani maupun ekonomi keluarga.

Di komunitas kami, saya juga melihat semakin banyak perempuan yang berani terlibat dalam organisasi, kelompok usaha, dan koperasi. Mereka tidak lagi hanya berperan sebagai peserta, tetapi juga menjadi penggerak dan sumber inspirasi bagi perempuan lainnya. Perubahan ini mungkin tidak terjadi secara instan, tetapi saya melihat langkah-langkah positif yang terus berkembang dari tahun ke tahun.

Yang paling menggembirakan bagi saya adalah ketika perempuan mulai menyadari bahwa suara dan kontribusinya memiliki nilai yang sama pentingnya. Ketika perempuan diberi kesempatan untuk belajar, berpartisipasi, dan memimpin, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh keluarga, komunitas, dan keberlanjutan sektor pertanian secara keseluruhan.

Saya percaya bahwa masih ada tantangan yang perlu kita hadapi bersama, tetapi arah perubahannya sudah sangat baik. Saat ini yang terpenting adalah memastikan bahwa kesempatan tersebut terus terbuka, sehingga semakin banyak perempuan petani yang dapat berkembang, berdaya, dan menjadi bagian penting dalam kemajuan pertanian di daerah kita.

4. Dari semua yang Ibu pelajari melalui pendampingan Rikolto, apa dampak yang paling terasa bagi Ibu secara pribadi?

Dari semua yang saya pelajari dan terima

melalui Rikolto, yang paling terasa manfaatnya adalah pendekatan pendampingan yang menyeluruh. Rikolto tidak hanya mendampingi petani dalam aspek budidaya, tetapi juga hingga proses pascapanen, peningkatan kualitas, penguatan kelembagaan, serta pemahaman tentang pemasaran dan akses pasar. Bagi kami petani, hal ini sangat penting karena keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh bagaimana kami menanam, tetapi juga bagaimana kami mengelola hasil dan menjualnya dengan nilai yang lebih baik.

Selain meningkatkan keterampilan teknis, pendampingan yang saya terima juga mengubah cara saya memandang diri sendiri sebagai petani dan sebagai perempuan. Dulu saya melihat diri saya hanya sebagai bagian dari proses pertanian. Namun seiring mengikuti berbagai kegiatan dan pelatihan, saya mulai menyadari bahwa pengalaman, pengetahuan, dan suara yang saya miliki juga bernilai dan layak didengar.

Salah satu perubahan terbesar yang saya rasakan adalah tumbuhnya rasa percaya diri. Saya yang dulu lebih banyak mendengarkan, kini berani menyampaikan pendapat, berdiskusi dengan berbagai pihak, bahkan berbicara di depan banyak orang. Saya juga belajar bahwa perempuan bukan hanya pelengkap dalam sektor pertanian, tetapi dapat menjadi penggerak perubahan dan pemimpin di komunitasnya.

Hal lain yang sangat saya apresiasi adalah bagaimana perempuan dan anak muda ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses perubahan. Saya melihat semakin banyak perempuan yang percaya diri untuk memimpin, mengambil keputusan, dan mengembangkan usaha tani. Di saat yang sama, semakin banyak anak muda yang mulai melihat pertanian sebagai sektor yang memiliki masa depan dan peluang yang menjanjikan.

Bagi saya, dampak terbesar dari pendampingan seperti ini bukan hanya peningkatan kapasitas individu, tetapi juga tumbuhnya kepercayaan

diri, semakin kuatnya organisasi petani, dan lahirnya generasi baru yang melihat pertanian sebagai sektor yang layak dibanggakan. Hari ini saya tidak lagi melihat diri saya hanya sebagai seseorang yang bekerja di kebun. Saya melihat diri saya sebagai petani, pemimpin komunitas, dan seorang ibu yang memiliki kesempatan untuk membawa perubahan bagi orang-orang di sekitar saya.

5. Jika Ibu bisa berpesanan kepada perempuan muda yang ingin mulai bertani kakao, apa yang akan Ibu sampaikan?

Untuk perempuan muda yang ingin mulai bertani kakao, saya ingin bilang: jangan ragu dan jangan malu. Bertani itu bukan pekerjaan kecil ini pekerjaan yang mulia, yang menghidupi banyak keluarga dan masa depan kita.

Dari pengalaman saya, pertanian mengajarkan hal yang tidak bisa didapat di tempat lain: kesabaran, ketekunan, dan rasa bangga atas hasil kerja sendiri. Perempuan justru punya kekuatan besar di sini lebih teliti, konsisten, dan mampu menjaga kualitas dari proses ke proses.

Yang paling penting, terus mau belajar dan membuka diri. Karena ketika perempuan berani masuk ke dunia pertanian, dia tidak hanya mengubah hidupnya sendiri, tapi juga menggerakkan keluarga dan komunitasnya.

Ingatlah, kita tidak pernah tahu pekerjaan kita akan membawa kita sampai mana, jadi mulailah dari apa yang ada, jalani dengan cinta, dan biarkan prosesnya membimbing kita.

“Saya tidak tahu sampai di mana jalan ini membawa saya, tapi saya tahu setiap langkah di kebun adalah investasi untuk masa depan saya”

Kisah Ibu Ayu menunjukkan bahwa pertanian tidak hanya tentang menghasilkan panen,

tetapi juga tentang membangun komunitas, menciptakan peluang, dan memberdayakan lebih banyak orang untuk berkembang bersama. Melalui perannya sebagai petani, pemimpin koperasi, dan ibu, Ayu membuktikan bahwa perempuan dapat menjadi penggerak perubahan yang membawa dampak nyata bagi keluarga dan masyarakat di sekitarnya.

Cerita ini juga mengingatkan bahwa masa depan pertanian Indonesia membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk perempuan dan generasi muda. Ketika akses terhadap pengetahuan, pendampingan, dan kesempatan diperluas, pertanian tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga menjadi ruang untuk tumbuh, berinovasi, dan membangun masa depan yang lebih berkelanjutan.

Dari Luwu Utara, kisah Ayu menjadi inspirasi bahwa perubahan besar dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana: kemauan untuk terus belajar, keberanian untuk mengambil peran, dan semangat untuk membawa manfaat bagi sesama.

Nantikan edisi berikutnya dari "Memberdayakan Petani", di mana kami akan terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif petani dari berbagai daerah di Indonesia!

Profile

Empowering Farmers: The Story of Mrs. Ayu, a Rikolto-Supported Woman Farmer from North Luwu, South Sulawesi

Fathan Oktrisaf, Ferial Lubis,
Hendri Surya Widcaksana



Morning breaks slowly at one of the cocoa-producing centers in North Luwu Regency, Mrs. Ayu begins her day in the cocoa farm with the same enthusiasm she has maintained for many years. For Ayu, agriculture is not merely a source of livelihood, but also a space to learn, grow, and create positive change for the community around her.

In addition to being an active cocoa farmer, Ayu is also entrusted with leading the first women's agricultural cooperative in North Luwu. This role gives her the opportunity to encourage more women to participate in agricultural enterprise development, strengthen household economies, and take on leadership roles within their communities.

Ayu's journey demonstrates that women play a vital role in the agricultural sector. Despite continuing to face various challenges, ranging from access to resources to opportunities for capacity development, women farmers consistently demonstrate resilience and make meaningful contributions to sustaining agriculture.

Through the support and mentoring she has received from Rikolto, Ayu has benefited from enhanced technical capacity, stronger farmer institutions, and greater support for women and young people to take on larger roles within the agricultural sector.

In the following interview, Mrs. Ayu shares her journey as a cocoa farmer, the challenges

women face in agriculture, and her hopes for the future of farmers and Indonesia's younger generation.

1. Good morning, Mrs. Ayu. Could you tell us a little about yourself? How did you first get started in cocoa farming?

I am a mother, a farmer, and a cooperative leader who believes that significant change often begins with simple steps taken consistently.

Today, I have the honor of serving as the chairperson of the first women's agricultural cooperative in North Luwu. It is a responsibility that I carry with gratitude and a strong commitment to creating more opportunities for women to grow, become empowered, and play a role in the economic development of our communities.

My journey has not been limited to farming or cooperative activities. For many years, I have also been actively involved in various women's and youth organizations. Through discussion forums, social initiatives, and community outreach activities, I learned that everyone has extraordinary potential when given the opportunity to grow. These experiences shaped my understanding of leadership—not as being the one who walks ahead of everyone else, but as someone who encourages more people to move forward together.

Although I have many responsibilities, my

heart always returns to agriculture. There was a time when I realized that farming was not simply a job or a source of income, but a calling that I truly love. I fell in love with the process—watching seeds grow, caring for plants with patience, and witnessing harvests become the result of hard work and hope. That is why I chose to focus on farming, particularly cocoa development, while continuing to encourage the growth of resilient farmers in my community.

However, if there is one achievement I am most proud of above all the roles and positions I hold, it is being a mother. I am the mother of wonderful children who teach me every day about sincerity, patience, and the importance of continuous learning. They are the reason I keep moving forward, even when facing challenges. From them, I learned that true success is not only about what we achieve for ourselves, but also about the values we pass on to future generations.

When I look back on my journey, I think of the many women in rural areas who work tirelessly without much recognition, the farmers who continue to persevere despite numerous limitations, and the young people who hold big dreams for the future. My story is just one among many stories of hope, hard work, and the belief that through cooperation, courage, and a willingness to keep learning, we can all create meaningful change for our families, our communities, and the places we call home.

2. In your opinion, as a woman cocoa farmer, what are the biggest challenges you face today?

In my view, women and men have the same potential to become successful farmers. However, in practice, women often face different challenges. Many women are involved throughout nearly the entire cocoa value chain, yet their contributions often remain less visible or less recognized.

Women also continue to face limitations

in access to land, capital, and training opportunities. Many women manage farms, but land ownership is still often registered under male family members. In addition, women must balance household responsibilities with farming activities, which can limit their opportunities to participate in training programs or access important information.

Over the past few years, we have also faced significant economic and environmental challenges. Rising production costs, climate change, and increasing pest and disease pressures have affected farm productivity. At the same time, access to markets that reward high-quality cocoa remains an area that needs further strengthening.

Therefore, the greatest challenge is not simply about prices, but about how farmers can increase productivity, maintain quality, and gain better market access so that farming can provide sustainable livelihoods and long-term prosperity.

3. In your opinion, what changes have you observed regarding the position and role of women farmers in the community today?

One of the most significant changes I have experienced is the increasing space for women to participate in decision-making processes, whether within households, farmer groups, or cooperatives. If several years ago women were often viewed merely as supporting partners in farming activities, today many are increasingly recognized as farmers, business managers, and even community leaders.

Through various programs I have participated in, I have seen women gain greater access to training, technical knowledge, financial management skills, and leadership development opportunities. These opportunities have had a tangible impact—not only in improving farming skills but also in building women's confidence to voice their opinions and make decisions related to farming and household economics.

Within our community, I have also witnessed more women becoming actively involved in organizations, business groups, and cooperatives. They are no longer simply participants; they have become drivers of change and sources of inspiration for other women. While this transformation has not happened overnight, I have seen positive progress continue year after year.

What brings me the greatest joy is seeing women recognize that their voices and contributions are equally valuable. When women are given opportunities to learn, participate, and lead, the benefits extend beyond themselves to their families, communities, and the long-term sustainability of the agricultural sector.

I believe there are still challenges that we must address together, but the direction of change is very encouraging. What is most important now is ensuring that these opportunities remain open, so that more women farmers can grow, become empowered, and contribute meaningfully to agricultural development in our region.

4. Of everything you have learned through Rikolto's support and mentoring, what impact has been most meaningful for you personally?

Of everything I have learned and received through Rikolto, the most valuable aspect has been its comprehensive mentoring approach. Rikolto supports farmers not only in cultivation practices but also in post-harvest management, quality improvement, institutional strengthening, and understanding marketing and market access. For us as farmers, this is extremely important because success is determined not only by how we grow crops, but also by how we manage and market our products to achieve greater value.

Beyond improving my technical skills, the support I received also transformed the way I see myself as both a farmer and a woman. In the past, I viewed myself simply as part of the farming process. However, through various

activities and training opportunities, I began to realize that my experiences, knowledge, and voice also have value and deserve to be heard.

One of the greatest changes I experienced has been the growth of my self-confidence. I used to spend more time listening, but now I am confident enough to express my opinions, engage in discussions with different stakeholders, and speak in front of larger audiences. I also learned that women are not merely supporting actors in agriculture—they can be drivers of change and leaders within their communities.

Another aspect I deeply appreciate is how women and young people are positioned as essential contributors to change. I have seen more women gain confidence to lead, make decisions, and develop farming enterprises. At the same time, more young people are beginning to see agriculture as a sector with a promising future and meaningful opportunities.

For me, the greatest impact of this kind of support is not only improved individual capacity, but also stronger self-confidence, stronger farmer organizations, and the emergence of a new generation that views agriculture as a profession to be proud of. Today, I no longer see myself simply as someone who works in the fields. I see myself as a farmer, a community leader, and a mother who has the opportunity to bring positive change to those around me.

5. If you could share a message with young women who want to start cocoa farming, what would you say?

To young women who want to begin cocoa farming, I would say: do not hesitate and do not be ashamed. Farming is not a small job—it is a noble profession that supports countless families and contributes to our future.

From my experience, agriculture teaches lessons that cannot easily be found elsewhere: patience, perseverance, and pride

in the results of your own hard work. Women have tremendous strengths in this field. They tend to be more meticulous, consistent, and capable of maintaining quality throughout every stage of the process.

Most importantly, continue learning and remain open to new opportunities. When women have the courage to enter the agricultural sector, they do not only transform their own lives—they also help move their families and communities forward.

Remember, we never truly know where our work may take us. So start with what you have, pursue it with passion, and allow the journey itself to guide you.

“I do not know where this path will ultimately lead me, but I know that every step I take in the farm is an investment in my future.”

Mrs. Ayu’s story shows that agriculture is not only about producing harvests, but also about building communities, creating opportunities, and empowering more people to grow together. Through her roles as a farmer, cooperative leader, and mother, Ayu demonstrates that women can be powerful agents of change who create meaningful impacts for their families and communities.

Her story also reminds us that the future of Indonesian agriculture requires the involvement of everyone, including women and young people. When access to knowledge, mentoring, and opportunities is expanded, agriculture becomes more than a source of livelihood—it becomes a space for growth, innovation, and the creation of a more sustainable future.

From North Luwu, Ayu’s journey serves as an inspiration that significant change can begin with simple steps: a willingness to keep learning, the courage to take on new roles, and the determination to create positive impacts for others.

Stay tuned for the next edition of “Empowering

Farmers,” where we will continue to share inspiring stories from farmers across Indonesia!



Sinarماس Land Plaza, Tower 2,
22nd Floor. Jl. MH Thamrin 51,
Jakarta 10350, Indonesia

✉ contact@pisagro.org
🌐 www.pisagro.org

📷 [pisagro_secretariat](https://www.instagram.com/pisagro_secretariat)
🌐 [PISAgro](https://www.linkedin.com/company/pisagro)

Anggota-anggota PISAgro - *PISAgro Members*



Save the Children



sinarmas



Knowledge grows

Mitra-mitra PISAgro - *PISAgro Partners*



CIPS
Center for Indonesian
Policy Studies



Filantropi
INDONESIA



LTKL
LINGKAR TEMU
KABUPATEN LESTARI



Solidaridad

